



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KOTA SALATIGA
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahNya, Pemerintah Kota Salatiga telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Salatiga Tahun 2024. Penyusunan laporan kinerja pemerintah ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kota Salatiga dalam mencapai misi dan tujuan serta dalam rangka perwujudan *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kota Salatiga Tahun 2024 ini menyajikan realisasi kinerja atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2024 yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Salatiga dan merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 untuk tahun yang pertama. Secara Umum realisasi kinerja Pemerintah Kota Salatiga dalam kriteria sangat baik, artinya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dialokasikan pada tahun 2024 telah berhasil, sehingga target-target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan LKjIP Kota Salatiga tahun 2024. Semoga LKjIP Kota Salatiga Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Salatiga, Maret 2025
WALI KOTA SALATIGA,


dr.ROBBY HERNAWAN, Sp.OG



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini merupakan pengukuran dan evaluasi pelaksanaan kinerja tahun ke-2 periode RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel. Pengumpulan data dan analisa dilakukan terhadap sasaran pembangunan yang menunjukkan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Wali Kota yang telah dicanangkan pada tahun 2024.

Hasil pengukuran kinerja terhadap 13 sasaran dengan 29 indikator kinerja utama berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Salatiga tahun 2024 disimpulkan bahwa **20** (dua puluh) Indikator Kinerja Utama atau **68,96%** dikategorikan **Sangat Baik**, **8** (delapan) Indikator Kinerja Utama atau **27,58%** dikategorikan **Baik** dan **1**(satu) Indikator Kinerja Utama atau **3,44%** dikategorikan **Cukup**.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Kategori
1	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas	Rata Rata Lama Sekolah	10,68 Tahun	11,48 Tahun	107,49	Sangat Baik
		Harapan Lama Sekolah	15,44 Tahun	15,46 Tahun	100,13	Sangat Baik
		Indek Literasi Masyarakat	Nilai 52,56	Nilai 63,14	120,13	Sangat Baik
2	Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	30%	44,98%	149,93	Sangat Baik
3	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	30 Medali	32 Medali	106,66	Sangat Baik
		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	20,59%	22,95%	111,46	Sangat Baik
4	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Angka Harapan Hidup	77,78 Tahun	77,93 Tahun	100,19	Sangat Baik
		Laju Pertumbuhan Penduduk	1,32%	1,18%	89,39	Baik
5	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Pertumbuhan Ekonomi	4,84%	4,48%	92,56	Baik
		Pendapatan per kapita	55,80 Juta	57,82 Juta	103,62%	Sangat Baik
6	Mewujudkan pengelolaan potensi	Pertumbuhan nilai investasi	10,22%	6,89%	67,41	Cukup



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Kategori
	daerah yang mendorong pada peningkatan Kerjasama antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Tingkat pengangguran terbuka	6,52%	3,86%	129,95	Sangat Baik
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,84%	70,72%	101,26	Sangat Baik
7	Meningkatkan katahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	95,00%	97,01%	102,11	Sangat Baik
		Pola Pangan Harapan	94.40%	94,40%	100	Baik
		Persentase Peminat Transmigrasi	3,70%	20%	540,54	Sangat Baik
8	Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	Score capaian KLA	Nilai 620	611 (data 2023)	98,55	Baik
		IDG	Nilai 80,05	Nilai 79,48 (data 2023)	98,73	Baik
		IPG	Nilai 95,50	Nilai 95,45 (data 2023)	99,95	Baik
9	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai 67,00	Nilai 80,21	119,71	Sangat Baik
10	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	100%	100%	100	Baik
		Penanggulungan Potensi Konflik	100%	100%	100	Baik
		Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap bencana	Nilai 3,86	Nilai 3,9	101,036	Sangat Baik
11	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik	55,00%	61,80%	112,36	Sangat Baik
12	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai 56,40	Nilai 61,45	108,95	Sangat Baik
		Rasio konektivitas kota	0,71%	0,88%	123,94	Sangat Baik
		Kinerja Lalu Lintas Kota	0,40%	0,31%	122,50	Sangat Baik
13	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan pemukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup	Persentase rumah yang didukung oleh PSU	10,37%	12,9%	124,40	Sangat Baik
		Pemukiman yang tertata	6,34%	6,62%	104,42	Sangat Baik



Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pencapaian 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama, telah dianggarkan melalui APBD Kota Salatiga sebesar Rp1.120.058.076.035,00,- dengan realisasi sebesar Rp1.041.750.433.639,00,- atau sebesar 93,01%.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota Salatiga kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR GAMBAR..... vii

DAFTAR TABEL viii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. LATAR BELAKANG 1

 B. DASAR HUKUM..... 1

 C. TUJUAN DAN MANFAAT..... 2

 1. Tujuan..... 2

 2. Manfaat 2

 D. GAMBARAN UMUM 2

 1. Aspek Geografis 2

 2. Aspek Demografis 6

 3. Aspek Pemerintahan 8

 E. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN 12

 F. SISTEMATIKA 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA 15

 A. RENCANA STRATEGIS 15

 B. ARAH KEBIJAKAN..... 16

 1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 16

 2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 17

 C. PRIORITAS PEMBANGUNAN..... 18

 D. PERJANJIAN KINERJA..... 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25

 A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 25

 1. Sasaran Strategis: Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas. 27

 2. Sasaran Strategis: Meningkatkan Apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah..... 32

 3. Sasaran Strategis: Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga..... 35

 4. Sasaran Strategis: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk. 39

 5. Sasaran Strategis: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk. 43

 6. Sasaran Strategis: Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan Kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga. 51



7. Sasaran Strategis: Meningkatkan Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.	55
8. Sasaran Strategis: Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesenjangan dan Keadilan Gender.	60
9. Sasaran Strategis: Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.	64
10. Sasaran Strategis: Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan.	71
11. Sasaran Strategis: Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata.	76
12. Sasaran Strategis: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.	79
13. Sasaran Strategis: Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup.	84
B. REALISASI ANGGARAN	88
BAB IV PENUTUP	91

LAMPIRAN

1. **Perjanjian Kinerja**
2. **Capaian IKU dan IKD Tahun 2024**
3. **Cascading 2024**



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kota Salatiga.....	3
Gambar 1.2	Letak Kota Salatiga dalam Konstalasi Jawa Tengah	4





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Administratif dan Jumlah RT/RW.....	4
Tabel 1.2	Data Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin.....	7
Tabel 1.3	Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2024	7
Tabel 1.4	Jumlah PNS Kota Salatiga Berdasarkan Jabatan, Jenis ASN, dan Jenis Kelamin (orang).....	10
Tabel 1.5	Jumlah PNS Kota Salatiga Berdasarkan Jabatan, Jenis ASN, dan Jenis Kelamin (orang).....	10
Tabel 1.6	Komposisi PNS Berdasarkan tingkat Pendidikan, jenis ASN dan Jenis Kelamin tahun 2024.....	11
Tabel 1.7	Komposisi PNS Berdasarkan tingkat Pendidikan, jenis ASN dan Jenis Kelamin tahun 2024.....	11
Tabel 1.8	Komposisi PNS Berdasarkan tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin tahun 2024.....	11
Tabel 1.9	Komposisi PNS Berdasarkan tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin tahun 2024.....	12
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Kota Salatiga Tahun 2024.....	19
Tabel 3.1	Scala Ordinal Pencapaian Indikator Tujuan/Sasaran Strategis.....	26
Tabel 3.2	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Maju dan Cerdas.....	29
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Maju dan Cerdas.....	29
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPD Sasaran Strategis: Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Maju dan Cerdas.....	29
Tabel 3.5	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis: Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Maju dan Cerdas.....	31
Tabel 3.6	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Apresiasi dan Penguatan Pemajuan Kebudayaan Daerah.....	33
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Apresiasi dan Penguatan Pemajuan Kebudayaan Daerah.....	33
Tabel 3.8	Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPD Sasaran Strategis: Meningkatkan Apresiasi dan Penguatan Pemajuan Kebudayaan Daerah	33



Tabel 3.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis: Meningkatkan Apresiasi dan Penguatan Pemajuan Kebudayaan Daerah	34
Tabel 3.10	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga	36
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga	36
Tabel 3.12	Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPD Sasaran Strategis: Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga	37
Tabel 3.13	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis: Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga	38
Tabel 3.14	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.....	40
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.....	40
Tabel 3.16	Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPD Sasaran Strategis: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.....	41
Tabel 3.17	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.....	41
Tabel 3.18	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk.....	44
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk.....	45
Tabel 3.20	Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPD Sasaran Strategis: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk.....	45
Tabel 3.21	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk.....	46
Tabel 3.22	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis: Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah yang Mendorong pada Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Pelaku Investasi dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Salatiga	52
Tabel 3.23	Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah yang Mendorong pada Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Pelaku Investasi dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Salatiga	53
Tabel 3.24	Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPD Sasaran Strategis: Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah yang Mendorong pada Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Antar	



	Pelaku Investasi dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Salatiga	53
Tabel 3.25	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis: Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah yang Mendorong pada Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Pelaku Investasi dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Salatiga	54
Tabel 3.26	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial	57
Tabel 3.27	Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial	57
Tabel 3.28	Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPD Sasaran Strategis: Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial	58
Tabel 3.29	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis: Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial	58
Tabel 3.30	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender.....	61
Tabel 3.31	Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender	62
Tabel 3.32	Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPD Sasaran Strategis: Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender	62
Tabel 3.33	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis: Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender	63
Tabel 3.34	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.....	65
Tabel 3.35	Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.....	66
Tabel 3.36	Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPD Sasaran Strategis: Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	66
Tabel 3.37	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis: Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	67
Tabel 3.38	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis: Menciptakan Tataan Kehidupan Masyarakat yang Tenram, Tertib dan Aman Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan	72
Tabel 3.39	Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Menciptakan Tataan Kehidupan Masyarakat yang Tenram, Tertib dan Aman Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan	73



Tabel 3.40	Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPD Sasaran Strategis: Menciptakan Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Tentram, Tertib dan Aman Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan	73
Tabel 3.41	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis: Menciptakan Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Tentram, Tertib dan Aman Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan	74
Tabel 3.42	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata.....	77
Tabel 3.43	Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata.....	77
Tabel 3.44	Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPD Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata....	77
Tabel 3.45	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata....	78
Tabel 3.46	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	81
Tabel 3.47	Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	81
Tabel 3.48	Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPD Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	82
Tabel 3.49	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	83
Tabel 3.50	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Lingkungan Perumahan Danpermukiman Perkotaan yang Merata bagi Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup.....	86
Tabel 3.51	Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Lingkungan Perumahan Danpermukiman Perkotaan yang Merata bagi Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup.....	86
Tabel 3.52	Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPD Sasaran Strategis: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Lingkungan Perumahan Danpermukiman Perkotaan yang Merata bagi Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup	86



Tabel 3.53 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis:
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Bersih,
Sanitasi, Lingkungan Perumahan Danpermukiman
Perkotaan yang Merata bagi Masyarakat dalam Rangka
Peningkatan Kualitas Hidup 87

Tabel 3.54 Perkembangan PAD Kota Salatiga Tahun 2013 - 2024 89

Tabel 4.1 Data Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota
Salatiga Tahun 2024 91





BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good governance*) merupakan prasyarat yang mutlak bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi, demokrasi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.
2. Transparansi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.
3. Demokrasi artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar utama kekuatan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal itu Pemerintah Kota Salatiga harus memiliki visi dan misi serta strategi yang jelas dan tepat untuk mencapai tujuan dan sasarannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sehingga dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu wujud upaya untuk mengetahui keseimbangan peran dan fungsi serta meningkatkan kinerja pemerintah adalah dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat memberikan gambaran pada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Salatiga Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;.



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat;
- b. Sebagai informasi kepada publik atas kinerja Pemerintah Kota Salatiga untuk memberikan saran/masukan dalam perbaikan kinerja.

2. Manfaat

Manfaat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Salatiga;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2024;
- c. Sebagai bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota salatiga di masa yang akan datang.

D. GAMBARAN UMUM

1. Aspek Geografis

Kota Salatiga secara astronomis terletak antara 007°.17' dan 007°.17'.23" Lintang Selatan, dan antara 110°.27'.56,81" dan 110°.32'.4,64" Bujur Timur. Kota Salatiga memiliki ketinggian 450-825 meter di atas permukaan air laut (DPL) dengan suhu rata-rata 23°C - 28°C, sehingga menyebabkan kondisi udara menjadi sejuk.

Secara morfologi Kota Salatiga berada di daerah cekungan kaki gunung Merbabu dan dikelilingi gunung-gunung kecil antara lain adalah Gunung Gajah Mungkur, Gunung Telomoyo, Gunung Payung dan Gunung Rong. Keberadaan gunung-gunung tersebut menyebabkan tanah di Kota Salatiga menjadi subur dan memiliki potensi alam yang cukup besar.

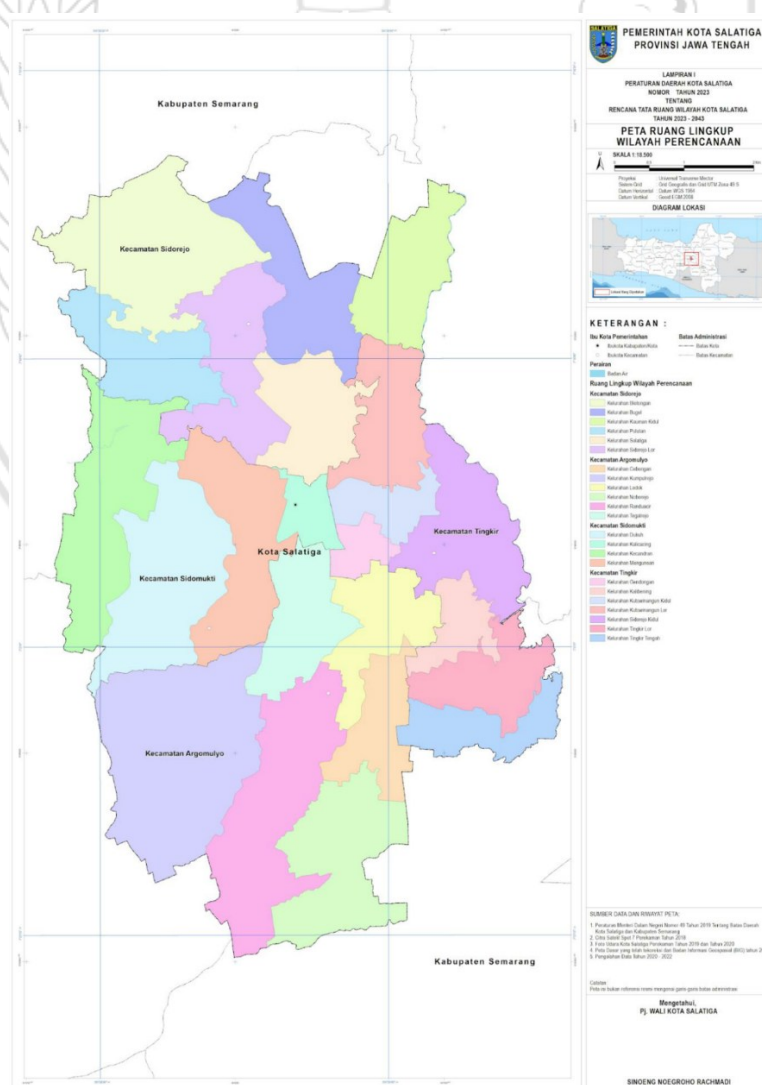
Berdasarkan topografi, wilayah Kota Salatiga terdiri dari 3 topografi yaitu daerah bergelombang (65%), daerah miring (25%), dan daerah datar (10%).

a. Sebelah Utara berbatasan dengan:

- Kecamatan Pabelan : Desa Pabelan, Desa Pejanten
- Kecamatan Tuntang : Desa Kesongo, Desa Watu Agung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan:
 - Kecamatan Pabelan : Desa Ujung-ujung, Desa Sukoharjo, Desa Glawan
 - Kecamatan Tenganan: Desa Bener, Desa Tegal Waton, Desa Nyamat
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan:
 - Kecamatan Getasan : Desa Sumogawe, Desa Samirono, Desa Jetak
 - Kecamatan Tenganan: Desa Patemon, Desa Karang Duren
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan:
 - Kecamatan Tuntang : Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sragen, Desa Gedongan
 - Kecamatan Getasan : Desa Polobogo Kecamatan Getasan.

Adapun Peta Kota Salatiga disajikan pada gambar 1.1 sebagai berikut:

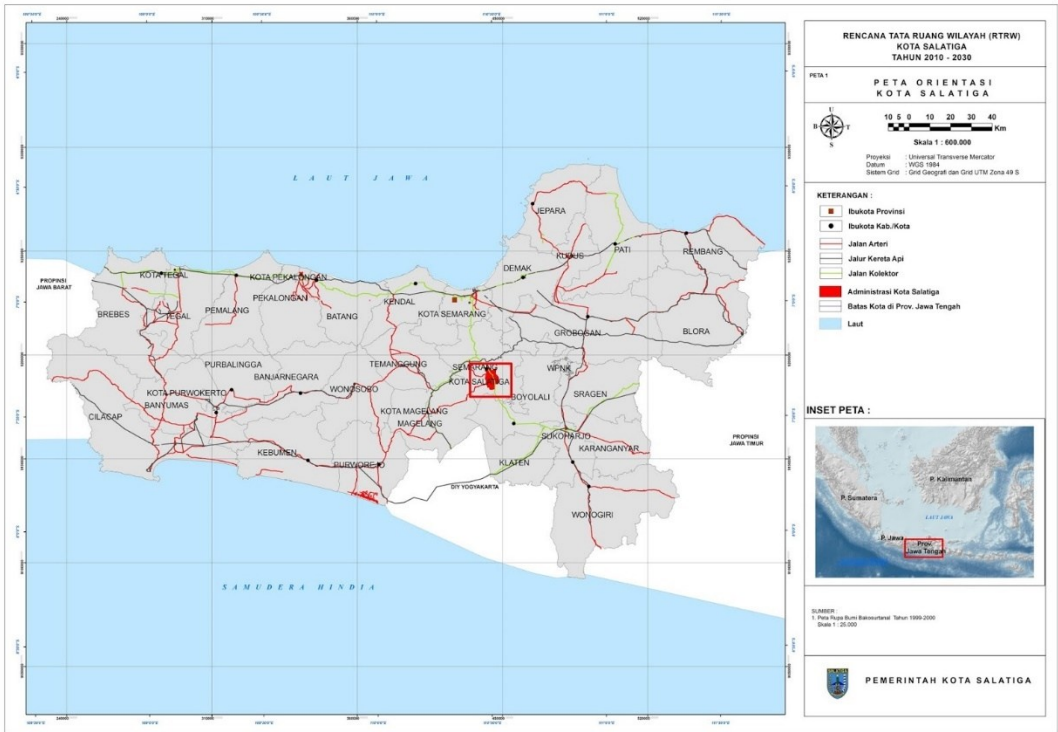
Gambar 1.1
Peta Kota Salatiga



Sumber : Dokumen RTRW Kota Salatiga

Kota Salatiga merupakan salah satu bagian dari 6 kota yang ada dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota Salatiga berjarak ± 53 kilometer dari Kota Surakarta dan ± 50 kilometer dari Kota Semarang, serta dilintasi jalur arteri primer (jalan nasional) Jakarta-Semarang-Surakarta. Karena menjadi perlintasan dua kota besar di Jawa Tengah (Semarang-Surakarta) dan perlintasan dari Jawa Timur (jalur tengah) ke Jawa Barat, maka transportasi darat yang melalui Kota Salatiga cukup ramai. Hal ini sebagai indikasi bahwa Kota Salatiga merupakan salah satu wilayah penting dan strategis di Jawa Tengah. Letak Kota Salatiga dalam konstalasi Jawa Tengah disajikan dalam gambar 1.2 sebagai berikut:

Gambar 1.2
Letak Kota Salatiga dalam Konstalasi Jawa Tengah



Sumber : Dokumen RTRW Kota Salatiga

Luas wilayah Kota Salatiga pada tahun 2024 tercatat sebesar 5678 Ha, terbagi menjadi 4 (empat) kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) kelurahan yang terdiri dari 1.144 Rukun Tetangga (RT) dan 210 Rukun Warga (RW). Adapun rincian luas wilayah kecamatan dan kelurahan serta jumlah RT maupun RW di Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Luas Wilayah Administratif dan Jumlah RT/RW

No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1.	KECAMATAN SIDOREJO	320	62
	1. Kelurahan Blotongan	74	15
	2. Kelurahan Bugel	23	7
	3. Kelurahan Kauman Kidul	25	7
	4. Kelurahan Pulutan	20	5
	5. Kelurahan Salatiga	83	12
	6. Kelurahan Sidorejo Lor	95	16



No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
2.	KECAMATAN TINGKIR	305	49
	1. Kelurahan Gendongan	38	5
	2. Kelurahan Kalibening	9	3
	3. Kelurahan Kutowinangun Lor	91	6
	4. Kelurahan Kutowinangun Kidul	70	8
	5. Kelurahan Sidorejo Kidul	40	9
	6. Kelurahan Tingkir Lor	25	8
	7. Kelurahan Tingkir Tengah	32	10
3.	KECAMATAN SIDOMUKTI	237	40
	1. Kelurahan Dukuh	75	10
	2. Kelurahan Kalicacing	39	7
	3. Kelurahan Kecandran	27	7
	4. Kelurahan Mangunsari	96	16
4.	KECAMATAN ARGOMULYO	286	59
	1. Kelurahan Cebongan	25	6
	2. Kelurahan Kumpulrejo	44	10
	3. Kelurahan Ledok	72	14
	4. Kelurahan Noborejo	37	10
	5. Kelurahan Randuacir	43	10
	6. Kelurahan Tegalrejo	63	9
JUMLAH		1.148	210

Sumber : Data Statistik Sektoral 2024

Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 135.2/0012576 tentang penyampaian Luas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah tanggal 18 September 2020, dengan telah ditetapkannya segmen batas daerah antara Kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang maka Luas wilayah administrasi Kota Salatiga terjadi perubahan dimana luas sebelumnya 5678 Ha menjadi seluas 5498 Ha.

Kota Salatiga merupakan bagian dari kawasan Strategis Nasional Kedungsepur. Kawasan ini selain didukung oleh potensi sumber daya alam dan prasarana juga memiliki letak strategis yang dapat mendorong pertumbuhan sektor industri, pariwisata, tanaman pangan dan perikanan. Strategi pengembangan untuk kawasan ini adalah secara intraregional sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura dan secara interregional dan nasional merupakan tempat transit perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan.

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga, pembagian struktur ruang wilayah di Kota Salatiga, masing-masing memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pusat Pelayanan Kota adalah sebagai pusat pemerintahan skala kota dan perdagangan dan jasa skala regional, pusat pelayanan pendidikan tinggi yang berpusat pada Kelurahan Kalicacing mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Kalicacing di Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo, dan Kelurahan Kutowinangun Kidul dan Kelurahan Kutowinangun Lor di Kecamatan Tingkir.



- b. Sub Pusat Pelayanan Kota Sidorejo berfungsi sebagai kawasan pendidikan, perdagangan dan jasa, pariwisata, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan beraa pada Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo.
- c. Sub Pusat Pelayanan Kota Sidomukti berfungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan kesehatan, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti.
- d. Sub Pusat Pelayanan Kota Argomulyo berfungsi sebagai pengembangan kawasan peruntukan industri, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, *sport centre*, perdagangan dan jasa, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo.
- e. Sub Pusat Pelayanan Kota Tingkir berfungsi kawasan pelayanan transportasi, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, perdagangan dan jasa, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir.
- f. Pusat Pelayanan Lingkungan, sebagai berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan, permukiman, dan perdagangan dan jasa, meliputi:
 - 1) Kecamatan Argomulyo, terdiri atas:
 - a) Kelurahan Noborejo;
 - b) Kelurahan Ledok;
 - c) Kelurahan Tegalrejo;
 - d) Kelurahan Kumpulrejo; dan
 - e) Kelurahan Cebongan.
 - 2) Kecamatan Sidomukti, terdiri atas:
 - a) Kelurahan Kecandran; dan
 - b) Kelurahan Dukuh.
 - 3) Kecamatan Sidorejo, terdiri atas:
 - a) Kelurahan Blotongan;
 - b) Kelurahan Bugel;
 - c) Kelurahan Kauman Kidul; dan
 - d) Kelurahan Pulutan.
 - 4) Kecamatan Tingkir, terdiri atas:
 - a) Kelurahan Gendongan;
 - b) Kelurahan Kalibening;
 - c) Kelurahan Tingkir Lor; dan
 - d) Kelurahan Tingkir Tengah.

2. Aspek Demografis

Jumlah penduduk di Kota Salatiga pada tahun 2024 sebanyak 198.840 jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 2.529 jiwa atau 25,29% dibandingkan tahun 2022. Jumlah penduduk laki-laki tahun 2024 adalah sebanyak 98.569 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 100.271 jiwa. Rasio jenis kelamin Kota Salatiga sebesar 98,74% atau dengan kata lain penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki.

Data jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin di Kota Salatiga tahun 2018-2024 disajikan pada tabel 1.2 sebagai berikut:



Tabel 1.2
Data Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	2018	96.490	98.121	194.611	98,34
2	2019	97.026	98.537	195.563	98,46
3	2020	97.326	98.756	196.082	98,55
4	2021	97.382	99.058	196.440	98,31
5	2022	99.403	100.817	200.220	98,60
6	2023	99.872	101.497	201.369	98,39
7	2024	98.569	100.271	198.840	98,74

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga

Persebaran penduduk Kota Salatiga tahun 2024 tertinggi terdapat di Kecamatan Sidorejo dengan jumlah penduduk sebanyak 54.626 jiwa dan terendah terdapat di Kecamatan Sidomukti dengan jumlah penduduk 45.634 jiwa. Data persebaran penduduk per Kecamatan di Kota Salatiga pada tahun 2024 disajikan pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2024

No	Kecamatan/Kelurahan	L	P	Jumlah
1.	KECAMATAN SIDOREJO	27.048	27.578	54.626
	1.Kelurahan Salatiga	7.065	7.283	14.348
	2.Kelurahan Bugel	1.822	1.839	3.661
	3.Kelurahan Sidorejo Lor	7.134	7.283	14.417
	4.Kelurahan Blotongan	6.544	6.558	13.102
	5.Kelurahan Pulutan	2.353	2.375	4.728
	6.Kelurahan Kauman Kidul	2.130	2.240	4.370
2.	KECAMATAN TINGKIR	23.264	23.940	47.204
	1.Kelurahan Kalibening	1.223	1.167	2.390
	2.Kelurahan Sidorejo Kidul	3.896	4.007	7.903
	3.Kelurahan Kutowinangun Lor	6.459	6.641	13.190
	4.Kelurahan Kutowinangun Kidul	3.859	4.111	7.970
	5.Kelurahan Gendongan	2.560	2.701	5.261
	6.Kelurahan Tingkir Tengah	2.726	2.725	5.451
	7.Kelurahan Tingkir Lor	2.541	2.588	5.129
3.	KECAMATAN ARGOMULYO	25.681	25.695	51.376
	1.Kelurahan Ledok	5.450	5.509	10.959
	2.Kelurahan Cebongan	2.612	2.631	5.243
	3.Kelurahan Tegalrejo	6.261	6.184	12.445
	4.Kelurahan Randuacir	3.603	3.576	7.179
	5.Kelurahan Kumpulrejo	4.316	4.315	8.631
	6.Kelurahan Noborejo	3.439	3.480	6.919
4.	KECAMATAN SIDOMUKTI	22.576	23.058	45.634
	1.Kelurahan Mangunsari	8.646	8.785	17.431
	2.Kelurahan Dukuh	7.208	7.450	14.658
	3.Kelurahan Kecandran	3.801	3.717	7.518
	4.Kelurahan Kalicacing	2.921	3.106	6.027
JUMLAH		98.569	100.271	198.840

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga



3. Aspek Pemerintahan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan berpegang pada prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan dari suatu daerah.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan, potensi dan kemampuan daerah. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara arif, adil dan selaras serta perlu memperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan peran tersebut daerah telah diberi kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan otonomi daerah Pemerintah Kota Salatiga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan disusunnya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah seperti tersebut diatas, maka susunan organisasi Pemerintah Kota Salatiga terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah Tipe B merupakan unsur staf;
- b. Sekretariat DPRD Tipe C merupakan unsur staf pendukung DPRD;
- c. Inspektorat Tipe B merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Dinas Daerah terdiri atas:
 - 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 2) Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - 3) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 4) Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;



- 6) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
 - 7) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan;
 - 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 9) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, dan bidang kearsipan;
 - 10) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - 11) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - 12) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
 - 13) Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - 14) Dinas Pangan dan Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, serta bidang kelautan dan perikanan;
 - 15) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 16) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - 17) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dan bidang pariwisata;
 - 18) Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
 - 19) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja, dan bidang transmigrasi.
- e. Badan Daerah berjumlah 3 (tiga) terdiri dari:
- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - 2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
 - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Besar melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang



- ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana.
- f. Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, terdiri atas:
- 1) Kecamatan Argomulyo Tipe A
 - 2) Kecamatan Sidorejo Tipe A;
 - 3) Kecamatan Tingkir Tipe A; dan
 - 4) Kecamatan Sidomukti Tipe B.
- g. Selain Perangkat Daerah sebagaimana diatas, dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan yang berjumlah 23 (dua puluh tiga).

Untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya aparatur yang memadai. Pada Tahun 2024 jumlah ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga sebanyak 3471 Orang, yang terdiri dari 1402 laki-laki dan 2069 perempuan. Selengkapny tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jumlah PNS Kota Salatiga
Berdasarkan Jabatan, Jenis ASN, dan Jenis Kelamin (orang)

NO	Jabatan	Pegawai Negeri Sipil		
		L	P	JUMLAH
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	-	-	-
2	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya		1	1
3	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	19	8	27
4	Administrator	74	32	106
5	Pengawas	104	108	212
6	Jabatan Fungsional Guru	487	601	888
7	Jabatan Fungsional Medis	136	440	576
8	Jabatan Fungsional Teknis	195	175	370
9	Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	437	329	766
	TOTAL	1252	1694	2946

Sumber : BPS

Tabel 1.5
Jumlah PNS Kota Salatiga
Berdasarkan Jabatan, Jenis ASN, dan Jenis Kelamin (orang)

NO	Jabatan	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja		
		L	P	JUMLAH
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	-	-	-
2	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	-	-	-
3	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	-	-	-
4	Administrator	-	-	-
5	Pengawas	-	-	-
6	Jabatan Fungsional Guru	110	234	344
7	Jabatan Fungsional Medis	20	115	135
8	Jabatan Fungsional Teknis	20	26	46
9	Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	-	-	-
	TOTAL	150	375	525

Sumber : BPS



Sedangkan komposisi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan tingkat Pendidikan, jenis ASN dan Jenis Kelamin tahun 2024 tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.6
Komposisi PNS Berdasarkan tingkat Pendidikan, jenis ASN dan Jenis Kelamin tahun 2024

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Sekolah Dasar	45	-	45
2	Sekolah Menengan Pertama (SMP)	66	-	66
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	189	81	270
4	Diploma I/Akta I	-	1	1
5	Diploma II/Akta II	9	3	12
6	Diploma III/Akta III	133	346	479
7	Diploma IV/Akta IV	23	51	74
8	S1/Sarjana	585	1018	1603
9	S2/Pasca Sarjana	200	194	394
10	S3/Doktor	2	-	2
TOTAL		1252	1694	2946

Sumber : BPS

Tabel 1.7
Komposisi PNS Berdasarkan tingkat Pendidikan, jenis ASN dan Jenis Kelamin tahun 2024

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KINERJA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Sekolah Dasar	-	-	-
2	Sekolah Menengan Pertama (SMP)	-	-	-
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	3	-	3
4	Diploma I/Akta I	-	-	-
5	Diploma II/Akta II	-	-	-
6	Diploma III/Akta III	21	100	121
7	Diploma IV/Akta IV	3	6	9
8	S1/Sarjana	120	264	384
9	S2/Pasca Sarjana	3	5	8
10	S3/Doktor	-	-	-
TOTAL		150	375	525

Sumber : BPS

Tabel 1.8
Komposisi PNS Berdasarkan tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin tahun 2024

NO	PANGKAT/GOLONGAN/ RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Juru Muda	-	-	-
2	Juru Muda Tingkat I	-	-	-
3	Juru	5	-	5
4	Juru Tingkat I	4	-	4
5	Pengatur Muda	75	2	77
6	Pengatur Muda Tk.I	22	-	22
7	Pengatur	90	65	155
8	Pengatur Tk.I	81	87	168
9	Penata Muda	161	181	342



NO	PANGKAT/GOLONGAN/ RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
10	Penata Muda Tk.I	213	352	565
11	Penata	122	246	368
12	Penata Tingkat I	261	466	727
13	Pembina	109	145	254
14	Pembina Tk.I	80	112	192
15	Pembina Utama Muda	29	36	65
16	Pembina Utama Madya	-	1	1
17	Pembina Utama	-	1	1
	TOTAL	1252	1694	2946

Sumber : BPS

Tabel 1.9
Komposisi PNS Berdasarkan tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin tahun 2024

NO	PANGKAT/GOLONGAN/ RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	I	-	-	-
2	II	-	-	-
3	III	-	-	-
4	IV	-	-	-
5	V	3	-	3
6	VI	-	-	-
7	VII	21	100	121
8	VIII	-	-	-
9	IX	120	262	382
10	X	6	13	19
11	XI	-	-	-
12	XII	-	-	-
13	XIII	-	-	-
14	XIV	-	-	-
15	XV	-	-	-
16	XVI	-	-	-
17	XVII	-	-	-
	TOTAL	150	375	525

Sumber : BPS

E.ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis pembangunan di Kota Salatiga berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan pembangunan dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Masih tingginya angka pengangguran dan banyaknya penduduk miskin akibat dampak Covid-19;
- 2. Masih belum optimalnya pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan;
- 3. Masih belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan serta kesenjangan pendapatan penduduk;



4. Belum optimalnya upaya Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dan belum optimalnya penanganan terhadap penyandang permasalahan kesejahteraan sosial;
5. Belum optimalnya penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik dan implementasi penguatan sistem inovasi daerah;
6. Belum optimalnya pemenuhan pelayanan infrastruktur;
7. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan serta belum optimalnya penegakan hukum pelanggaran tata ruang;
8. Belum optimalnya pengelolaan, pelestarian cagar budaya dan kesenian daerah.

F. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan dokumen LKjIP Kota Salatiga mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kota Salatiga tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja;
2. Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah
3. Lain-lain yang dianggap perlu.





BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan untuk perencanaan pembangunan selama tiga tahun kedepan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dituangkan ke dalam Rencana pembangunan Daerah. RPD akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menjabarkan program dan kegiatan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wali Kota dan Wakil Walikota, selain itu RPD akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan Perangkat Daerah selama tiga tahun kedepan.

RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan RPD penjabaran dari periode ke empat dari RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah : **“SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN”** dimana dalam periode tersebut, kebijakan perencanaan pembangunan daerah untuk perencanaan tahun 2023-2026 adalah:

1. Pemantapan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat;
2. Mendorong pemantapan perekonomian daerah yang tinggi, merata, berkeadilan dan berkelanjutan serta berdaya saing tinggi;
3. Pemantapan aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermanfaat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju;
4. Mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum dengan cara dilaksanakannya sistem hukum yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan mendukung tinggi HAM;
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berwawasan lingkungan pembangunan dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah kota, diarahkan pada dilaksanakannya tata ruang kota yang berwawasan lingkungan;
6. Mewujudkan pemantapan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.



B. ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi Pembangunan jangka menengah Kota Salatiga yang dilaksanakan melalui 13 tujuan dan 29 sasaran agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan arah kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan. Pentahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan tema, nuansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang kemudian akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja pembangunan daerah setiap tahunnya

Tahun 2024: MEWUJUDKAN INSAN YANG SEHAT DAN CERDAS MENUJU SALATIGA YANG BERSIH, SEHAT DAN BERILMU DAN BERBUDI LUHUR

Tema pembangunan tahun kedua ini merupakan tema dengan sasaran pada isu-isu Kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak serta memperbaiki mutu Pendidikan dalam segala dimansinya baik moral, intelegensi maupun perilaku harus dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur, sehingga masyarakat Salatiga dikenal sebagai masyarakat yang berbudi pekerti luhur berwawasan dan berkontribusi positif bagi lingkungannya.

1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang mengamanatkan agar RKPD Tahun 2023 memuat Kebijakan Pemulihan Ekonomi dalam Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), merencanakan program-program yang berdampak pada pemulihan perekonomian. Program-program tersebut meliputi bidang infrastruktur, bidang Sosial, bidang ketenagakerjaan dan kesehatan. maka pada Perubahan RKPD Tahun 2023, Pemerintah Kota Salatiga.

Pengalokasian program pemulihan ekonomi ini dimaksudkan untuk upaya percepatan aktivitas perekonomian yang sempat terhenti pada saat terjadi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Percepatan pemulihan ekonomi meliputi bidang infrastruktur, perlindungan sosial, dukungan dunia usaha terutama usaha mikro kecil dan menengah serta penciptaan lapangan kerja. Namun demikian Kota Salatiga tetap mengacu pada prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan tetap memperhatikan dinamika, potensi dan kondisi serta permasalahan yang timbul di daerah.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kota Salatiga difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan terutama UMKM, industri kecil dan menengah serta penataan pasar, pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga.

Perluasan kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian hukum dan kualitas



pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan dan industri kreativitas yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Salatiga.

2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan tata pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Secara umum, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

Sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Derajat kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah. Proporsi target Pendapatan Asli Daerah terhadap total target Pendapatan Daerah Kota Salatiga menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih belum dapat berjalan optimal dilihat dari sisi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan harus terus digali potensinya, tanpa harus memberatkan dunia usaha, dengan berbagai regulasi dan kebijakan daerah.



C. PRIORITAS PEMBANGUNAN

Prioritas Pembangunan Kota Salatiga tahun 2024 **“MEWUJUDKAN INSAN YANG SEHAT DAN CERDAS MENUJU SALATIGA YANG BERSIH, SEHAT DAN BERILMU DAN BERBUDI LUHUR”**. Dengan prioritas pembangunan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada PAUD, dikdas dan Pendidikan non formal
2. Peningkatan peran dan kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik guru PAUD, SD dan SMP.
3. Peningkatan peran orang tua dalam Pendidikan karakter
4. Pengembangan karakter muatan local sebagai penciri Kota Salatiga, kurikulum prototype dalam kerangka Merdeka Belajar
5. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pelestarian budaya dan kesenian termasuk kekayaan gastronomi
6. Peningkatan aktivitas kesenian dan budaya dengan focus pada kesenian tradisonal dan budaya lokal
7. Peningkatan aktivitas kesenian dan budaya dengan focus pada kesenian tradisional dan budaya lokal
8. Peningkatan kualitas layanan di tingkat pertama untuk meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca kalhiran baik pada ibu dan bayi
9. Penurunan gizi buruk difokuskan pada penanganan stunting, wasting, underweight, obesitas pada balita dan anak
10. Penurunan angka kesakitan di fokuskan pada penanganan penyakit menular (covid 19, TB, HIV AIDS), pengendalian lingkungan dan perilaku hidup sehat
11. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan focus peningkatan peserta KB baru (ummed need) peningkatan partisipasi KB pria dan pemeliharaan Kesehatan reproduksi pada remaja
12. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak, dalam rangka mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak
13. Peningkatan kolaborasi stakeholder dalam pencapaian kesejahteraan sosial dengan memperhatikan kemampuan PMKS untuk makin mandiri, serta sinergitas Lembaga pengelola PMKS
14. Akselerasi pemenuhan hak anak dengan prioritas pada anak-anak korban kekerasan termasuk TPPO, difabel dan anak-anak rentan
15. Penguatan pengarusutamaan gender dengan focus pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
16. Peningkatan pemenuhan pangan bagi masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam rangka meningkatkan konsumsi energi dan protein masyarakat
17. Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang
18. Peningkatan wawasan kebangsaan yang mengedepankan persatuan dan kesatuan warga Salatiga.

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah



komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Berikut tabel Perjanjian Kinerja Kota Salatiga Tahun 2024:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kota Salatiga Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024
1	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas	Rata Rata Lama Sekolah	tahun	10,68
		Harapan Lama Sekolah	tahun	15,44
		Indek Literasi Masyarakat	Nilai	52,56
2	Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	30
3	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	medali	30
		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	20,59
4	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Angka Harapan Hidup	tahun	77,78
		Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,32
5	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,841
		Pendapatan per kapita	juta	55,8
6	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan Kerjasama antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Pertumbuhan nilai investasi	%	10,22
		Tingkat pengangguran terbuka	%	6,46 - 5,51
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	69,84
7	Meningkatkan katahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	%	95
		Pola Pangan Harapan	%	94,4
		Persentase Peminat Transmigrasi	%	3,7
8	Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	Score capaian KLA	Nilai	620
		IDG	Nilai	80,5
		IPG	Nilai	95,5



NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024
9	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	67
10	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	%	100
		Penanggulangan Potensi Konflik	%	100
		Indek Ketahanan Daerah (IKD) terhadap bencana	%	3,86
11	Meningkatkan kualitas pentaan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Persentase Kawasan wajah kota yang tertata dengan baik	%	55
12	Meningkaykan kualitas lingkungan hidup dlam mendukung pembangunan berkelanjutan	Indek kualitas lingkungan Hidup	Nilai	56,4
		Rasio konektivitas kota	%	0,71
		Kinerja lalu lintas kota	%	0,4
13	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan pemukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup	Persentase rumah yang didukung oleh PSU	%	10,37
		Pemukiman yang tertata	%	6,34

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024 (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	738.532.106.312
2	Program Pengelolaan Pendidikan	44.321.457.664
3	Program Pengembangan Kurikulum	33.521.600
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	19.901.524.027
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	0
6	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	194.273.200
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	47.440.402.239
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	603.041.000
9	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	448.337.000
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.249.149.596
11	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	4.614.876.935
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11.704.985.000
13	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	11.206.655.194
14	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	9.961.734.200
15	Program Penataan Bangunan Gedung	642.670.000



NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024 (Rp)
16	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	3.264.130.500
17	Program Penyelenggaraan Jalan	20.987.662.335
18	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	204.984.000
19	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	774.000.000
20	Program Pengembangan Perumahan	1.015.966.200
21	Program Kawasan Permukiman	11.714.169.683
22	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	14.494.749.528
23	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.063.468.000
24	Program Penanggulangan Bencana	1.889.965.400
25	Program Pencegahan, Penaggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	195.000.000
26	Program Pemberdayaan Sosial	622.360.576
27	Program Rehabilitasi Sosial	955.348.000
28	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.095.003.000
29	Program Penanganan Bencana	38.803.000
30	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	139.529.548
31	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.310.000.000
32	Program Penempatan Tenaga Kerja	217.910.100
33	Program Hubungan Industrial	266.692.200
34	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	275.783.000
35	Program Perlindungan Perempuan	310.034.000
36	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	694.509.700
37	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	0
38	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	330.403.900
39	Program Perlindungan Khusus Anak	280.425.500
40	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	7.190.600
41	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	860.976.400
42	Program Penanganan Kerawanan Pangan	17.548.000
43	Program Pengawasan Keamanan Pangan	60.233.000
44	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	138.864.700
45	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	31.645.828
46	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	192.113.600
47	Program Penatagunaan Tanah	2.524.057.000
48	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	102.370.100
49	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	480.112.400
50	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	3.657.829.887
51	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	78.344.300



NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024 (Rp)
52	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	63.029.000
53	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	84.023.000
54	Program Pengelolaan Persampahan	2.644.157.894
55	Program Pendaftaran Penduduk	635.940.116
56	Program Pencatatan Sipil	71.912.000
57	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	63.700.000
58	Program Pengendalian Penduduk	593.898.300
59	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.469.541.279
60	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.301.205.000
61	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.555.087.148
62	Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik	584.184.700
63	Program Aplikasi Informatika	2.290.459.851
64	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	56.032.900
65	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	54.852.000
66	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	256.186.200
67	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	161.743.000
68	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.224.169.564
69	Program Pengembangan UMKM	593.663.700
70	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	122.344.000
71	Program Promosi Penanaman Modal	97.207.500
72	Program Pelayanan Penanaman Modal	60.339.318
73	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	397.240.000
74	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	592.894.000
75	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	8.486.720.306
76	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan	2.514.921.600
77	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	198.635.300
78	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	40.149.000
79	Program Pengembangan Kebudayaan	1.039.292.115
80	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	62.325.170
81	Program Pembinaan Sejarah	271.563.500
82	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	31.692.500
83	Program Pengelolaan Permuseuman	16.211.000
84	Program Pembinaan Perpustakaan	7.335.138.101



NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024 (Rp)
85	Program Pengelolaan Arsip	500.400.250
86	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	0
87	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	106.890.500
88	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	31.538.000
89	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	610.232.790
90	Program Pemasaran Pariwisata	1.319.585.593
91	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	23.477.200
92	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	19.219.000
93	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	38.825.000
94	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	222.288.422
95	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	58.157.800
96	Program Penyuluhan Pertanian	580.151.800
97	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	7.225.000
98	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.313.954.850
99	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	45.777.400
100	Program Pengembangan Ekspor	82.796.500
101	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	30.573.500
102	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.775.965.583
103	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	31.415.000
104	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industrial Nasional	189.338.000
105	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.890.700.700
106	Program Perekonomian dan Pembangunan	938.139.500
107	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	22.874.135.523
108	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	813.108.700
109	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.037.080.800
110	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.670.880.000
111	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.540.593.000
112	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.540.593.000
113	Program Kepegawaian Daerah	1.043.485.170
114	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.463.182.800
115	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	114.915.000
116	Program Penyelenggaraan Pengawasan	104.037.000
117	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	914.822.904



NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024 (Rp)
118	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	370.618.000
119	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	25.101.312.900
120	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	457.844.100
121	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.643.552.200
122	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	842.513.000
123	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	12.689.909.536
124	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.731.008.000
125	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	167.632.000
126	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	713.690.300
JUMLAH		1.120.058.076.035





BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban secara tepat, jelas dan terukur. Untuk itu Pemerintah Kota Salatiga menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Salatiga Tahun 2023 disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2024 memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Salatiga (PK Perubahan Kota Salatiga) Tahun 2024.

Laporan Kinerja dilengkapi dengan Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja terhadap masing-masing indikator pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Salatiga dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Persentase Capaian Indikator Kinerja

=

Realisasi

Rencana

X 100%

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya capaian kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya capaian kinerja, digunakan rumus:

Persentase Capaian Indikator Kinerja

=

Rencana - (Realisasi - Rencana)

Rencana

X 100%

atau dengan menggunakan rumus:



Persentase Capaian Indikator Kinerja

=

(2 x Rencana) - Realisasi

Rencana

X 100%

Selanjutnya untuk mempermudah dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan dalam penilaian kinerja pemerintah, digunakan kriteria penilaian dengan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Ordinal Pencapaian Indikator Tujuan/Sasaran Strategis

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	> 100%	Sangat Baik
2	75% - 100%	Baik
3	55% - 74%	Cukup
4	< 55%	Kurang

Capaian kinerja per Tujuan/Sasaran Strategis pada tahun 2023 dilakukan analisis dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD);
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sedangkan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya digunakan rumus sebagai mana terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

- E

: Efisiensi
- PAKi

: Pagu Anggaran Keluaran i
- RAKi

: Realisasi Anggaran Keluaran i
- CKi

: Capaian Keluaran i

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.



Hasil analisa capaian kinerja berdasarkan Sasaran Strategis Pemerintah Kota Salatiga tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis: Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas.

Tujuan/Sasaran Strategis 1 (satu) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas. terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Indeks Literasi Masyarakat.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 1 (satu) adalah Meningkatnya Kualitas dan tingkat Pendidikan Masyarakat secara luas dan Mewujudkan masyarakat cerdas dan kreatif dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut:

- a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD
 - b. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI
 - c. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs
 - d. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan
- Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah:

➤ **Dinas Pendidikan**

- e. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
- Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah:

➤ **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah serta Indeks Literasi Masyarakat tidak terlepas dari tercapainya target kinerja Indikator Kinerja Daerah pada sasaran meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan non formal bagi masyarakat.

Perhitungan dan Pengolahan data untuk mengukur realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah dilakukan oleh BPS, sedangkan Indeks Literasi Masyarakat melalui survey yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Berikut Analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah dan Indeks Literasi Masyarakat.

1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang diselesaikan dalam pendidikan formal.

Untuk penghitungan indikator ini menggunakan formulasi sebagai berikut:



$$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } i)$$

dengan:

- P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas
Lama sekolah penduduk ke- i =
- a. Tidak pernah sekolah = 0
 - b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
 - c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1
 - d. Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir
 - e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1

2. **Harapan Lama Sekolah**

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu dimasa mendatang. Untuk penghitungan indikator ini menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

- HLSta = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t
Eti = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t
i = Usia (a, a + 1, ..., n)
FK = Faktor koreksi pesantren

Indikator kinerja Harapan Lama Sekolah merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

3. **Indeks Literasi Masyarakat**

- Indek literasi masyarakat diukur dari kemampuan:
- Membaca
 - Bicara
 - Menulis
 - Memahami bacaan
 - Eksplorasi pengetahuan
 - Trnasformasi menjadi pengetahuan
 - Transformasi menjadi produk/jasa

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
Target IKU pada Sasaran Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh



masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas Tahun 2024 realisasi kinerjanya memenuhi target yang ditetapkan dan capaian kinerjanya melebihi target yang ditetapkan, adapun data tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Maju dan Cerdas

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2024	Realisasi 2024
Rata Rata Lama Sekolah	10,68	11,48
Harapan Lama Sekolah	15,44	15,44
Indeks Literasi Masyarakat	52,56	63,14

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**
Realisasi kinerja Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas tahun 2024 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dan 2023 terus mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Maju dan Cerdas

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realiasi Kinerja			Capaian Kinerja		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Rata Rata Lama Sekolah	10,95	11,48	11,24	110,05	105,34	107,49
Harapan Lama Sekolah	15,43	15,46	15,44	102,94	100,06	100,13
Indeks Literasi Masyarakat	NA	63,14	63,14	NA	121,28	120,13

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).**
Sasaran Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas tahun 2024 dari 3 indikator kinerja sudah melebihi dari target yang ditentukan pada akhir RPD 2026, tersaji pada table berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPD
Sasaran Strategis: Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Maju dan Cerdas

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2024	Target Akhir RPD 2026
Rata Rata Lama Sekolah	11,48	10,70
Harapan Lama Sekolah	15,46	15,46
Indeks Literasi Masyarakat	63,14	53,26



dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2024 semua indikator pada sasaran ini sudah melebihi dari target yang diharapkan.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

- Berdasarkan data BPS wilayah Jawa Tengah, Rata-rata Lama Sekolah penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas tahun 2024 adalah 8.02 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 adalah 12,86 tahun. Dengan demikian Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kota Salatiga lebih tinggi dari Rata-rata Lama Sekolah penduduk Indonesia secara nasional dan Rata-rata Lama Sekolah penduduk di Provinsi Jawa Tengah.
- Target Nasional Indeks Literasi Masyarakat adalah 71% sedangkan realisasi tahun Indeks Literasi Masyarakat tahun 2024 adalah 63,14 jadi belum memenuhi standar nasional .

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk tingkat keberhasilan sasaran Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas diantaranya:

Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah berpengaruh terhadap investasi pengembangan sumber daya manusia. Terdapat empat kriteria untuk investasi pengembangan sumber daya manusia yaitu (1) kebutuhan tenaga kerja terampil dalam lapangan kejuruan dan teknologi, (2) perluasan pendidikan dasar yang dipandang memiliki tingkat keuntungan/manfaat (rate of return) yang lebih tinggi sehubungan dengan rendahnya biaya, (3) pengembangan sektor pedesaan sehingga memperlihatkan peranan pendidikan massal untuk meningkatkan produktivitas sektor pedesaan, (4) keadilan dan pemerataan yang menunjukkan pentingnya distribusi kesempatan memperoleh pendidikan dan bentuk-bentuk pengembangan SDM lain baik secara geografis, social, dan ekonomis. Pendidikan menjadi salah satu aspek indikator, dengan mengukur harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Di Kota Salatiga Angka Partisipasi Sekolah PAUD 97,88%, angka partisipasi SD/MI sebesar 99,34%, angka partisipasi sekolah SMP/MTs 96,82%, angka partisipasi sekolah kesetaraan 71,05%, angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,005% dan angka putus sekolah SMP/MTs 0,058%.

Indek literasi masyarakat dapat berhasil dipengaruhi beberapa factor diantaranya adanya ketersediaan koleksi baik dalam bentuk buku maupun ebook, bertambahnya perpustakaan rintisan di masyarakat, peningkatan prosmosi literasi, peningkatan kegiatan literasi melalui lomba dan peningkatan peran bunda literasi melalui pelibatan masyarakat mulai perpustakaan berbasis inklusi soasial dan penambahan sarana

prasarana literasi seperti, taman literasi, perpustakaan di taman cerdas dan perluasan perpustakaan daerah.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran Strategis: Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Maju dan Cerdas

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Anggaran	Realisasi	Capaian	
Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas	Pengelolaan Pendidikan	53.193.877.164	52.055.417.155	97,86	99,10%
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	19.901.524.027	18.140.715.248	91,15	99,17%
	Pengendalian Perizinan Pendidikan	0	0	0	0%
	Pengembangan kurikulum	33.521.600	30.821.600	91,95	99,16%
	Pengembangan Bahasa dan Sastra	194.273.200	169.862.000	87,43	99,20%
	Pembinaan perpustakaan	7.709.103.101	6.959.645.028	90,28	99,17%

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan perhitungan di atas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung Sasaran Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas Sekolah sebesar 99,13%.

- g. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah antara lain:

- Dinas Pendidikan
- 1) Program Pengelolaan Pendidikan yang diarahkan pada kegiatan pengelolaan pendidikan SD, SMP dan PAUD, serta pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan, pemberian Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) PAUD, SD, SMP dan Non Formal/Kesetaraan, pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pemenuhan prasarana sarana penunjang seperti pembangunan/rehabilitasi laboratorium, perpustakaan dan sanitasi sekolah.

2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diarahkan pada Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

3) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan yang diarahkan pada pengendalian, pengawasan dan penilaian kelayakan perizinan Lembaga PAUD dan Pendidikan Non



Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk dokumen penilaian kelayakan usulan perizinan pendidikan.

- 4) Program Pengembangan Kurikulum yang diarahkan pada Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar.
- 5) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra dengan diarahkan pada pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan memberikan fasilitasi, *workshop* serta apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra.

• **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

- 1) Program Pembinaan Perpustakaan yang diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota dan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota dengan capaian program nilai tingkat kegemaran membaca.

2. Sasaran Strategis: Meningkatkan Apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah.

Sasaran Strategis 2 (dua) meningkatkan Apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah hanya terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 2 (satu) adalah Meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah dengan variabel indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut:

- a. Persentase obyek pemajuan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan
- b. Persentase cagar budaya yang dilestarikan

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 2 (dua) adalah **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**.

Untuk menghitung realisasi kinerja pada indikator cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan digunakan rumus sebagai berikut:

<i>Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan</i>	$= \frac{\text{Jumlah cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan}}{\text{Jumlah seluruh cagar budaya sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang ditata}} \times 100\%$
---	--

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan tahun 2024 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:



- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
Target Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan Tahun 2024 sebesar 30% dan terealisasi sebesar 32%, sehingga capaian indikator kinerja adalah 149,93% dengan kategori Sangat Baik.

Tabel 3.6
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Apresiasi dan Penguatan Pemajuan Kebudayaan Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2024	Realisasi 2024
Cakupan Cagar Budaya, Sejarah dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	30	44,98

- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**
Realisasi kinerja untuk Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan pada tahun 2024 terealisasi 44,98 dari target 30 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 32,69 maka tahun 2024 mengalami peningkatan, Adapun data dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Apresiasi dan Penguatan Pemajuan Kebudayaan Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
	2023	2024	2023	2024
Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	32	149,93	32,36	172,05

- c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).**
Realisasi kinerja Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan tahun 2024 sebesar 44,98% sedangkan target dalam RPD tahun 2024 sebesar 52% ditahun kedua ini belum dapat tercapai dari target akhir RPD tahun 2026 sebesar 52%.

Tabel 3.8
Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPD
Sasaran Strategis: Meningkatkan Apresiasi dan Penguatan Pemajuan Kebudayaan Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target kinerja 2024	Realisasi Kinerja 2024	Target RPD 2026
Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	30	44,98	52



d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Penyebab keberhasilan tercapainya target dari indikator ini adalah:

- 1) Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pemerhati seni budaya, sekolah/ perguruan tinggi, masyarakat, OPD/ instansi, dan Stakeholder dalam mengelola cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan.
- 2) Tingginya animo/ partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap seni budaya daerah.
- 3) Kerjasama dan koordinasi yang maksimal dengan pemerhati seni budaya, pemerhati cagar budaya dan sejarawan, sekolah/ perguruan tinggi, pelaku pariwisata, masyarakat, OPD/ Instansi terkait dan stakeholder dalam menyelenggarakan dan mengembangkan serta mempromosikan obyek pemajuan budaya salatiga serta lekasnakan pembinaan dan pelestarian cagar budaya secara berkala.
- 4) Banyaknya potensi benda cagar budaya dan peninggalan sejarah di Kota Salatiga.
- 5) Edukasi masyarakat dan sekolah tentang objek pemajuan budaya melalui lomba seni budaya dan berbagai pentas/ event pagelaran seni serta edukasi cagar budaya melalui sosialisasi hasil kajian cagar budaya dan lomba-lomba tentang cagar budaya.

f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran Strategis: Meningkatkan Apresiasi dan Penguatan Pemajuan Kebudayaan Daerah

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Anggaran	Realisasi	Capaian	
Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Pengembangan Kebudayaan	1.039.292.115	1.033.126.100	99,41	99,34%
	Pengembangan Kesenian Tradisional	62.325.170	60.234.650	96,65	99,36%
	Pembinaan Sejarah	271.563.500	259.901.680	95,71	99,36%
	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	31.692.500	27.866.500	87,93	99,41%
	Pengelolaan Permuseuman	16.211.000	16.211.000	100	99,33%

Sumber : Data yang diolah



Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian meningkatkan Apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah sebesar 99,34%.

g. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain:

• **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan yang diarahkan pada kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota dengan capaian program persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan.
- 2) Program Pengembangan kesenian tradisional yang diarahkan pada kegiatan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program adalah Persentase SDM, Lembaga dan pranata yang dibina.
- 3) Program Pembinaan Sejarah yang diarahkan pada kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase kajian sejarah.
- 4) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya yang diarahkan pada kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program Persentase penetapan cagar budaya.
- 5) Program Pengelolaan Permuseuman yang diarahkan sasaran kegiatan pengelolaan museum kota.

3. Sasaran Strategis: Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga.

Sasaran Strategis 3 (tiga) Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Peningkatan prestasi olahraga dan Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 3 (tiga) adalah Meningkatnya Prestasi dalam Olahraga dan Meningkatnya partisipasi pemuda dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut:

- a. Cakupan pembinaan Olahraga
- b. Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
- c. Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 3 (tiga) adalah: **Dinas Kepemudaan dan Olahraga.**



1. **Peningkatan Prestasi Olahraga**
Indikator Peningkatan Prestasi Olahraga merupakan perhitungan dari jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional.
2. **Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan**

Indikator ini dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\left(\frac{\text{Jumlah wirausaha muda}}{\text{Jumlah seluruh wirausaha}} \times 100\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi pemuda}} \times 100\% \right)$$

2

Selengkapnya analisa terhadap capaian Sasaran strategis Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga tahun 2024 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
Target sasaran Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga tahun 2024 yang terdiri dari 2 indikator kinerja dapat terealisasi diatas target yang ditentukan, selanjutnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja 2024
Peningkatan prestasi olahraga	30	32	106,66
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	20,59	22,95	111,46

- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**
Realisasi Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga tahun 2024 realisasi dari 2 indikator ini dapat tercapai diatas 100% akan tetapi bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 ada 1 indikator yang mengalami penurunan capaian kinerjanya, Adapun data dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
	2023	2024	2023	2024
Peningkatan prestasi olahraga	39	32	260	106,66
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	23,23	22,95	112,82	111,46



c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).**

Realisasi Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga tahun 2024 untuk 2 indikator ini sudah dapat tercapai ditahun kedua ini dari target RPD 2026 yang ditentukan, Adapun data dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPD
Sasaran Strategis: Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2024	Realisasi Kinerja 2024	Target RPD 2026
Peningkatan prestasi olahraga	30	32	16
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	20,59	22,95	21

d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**

Tidak ada standar nasional dalam indikator Peningkatan prestasi olahraga.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan untuk indikator ini Pemerintah Kota Salatiga melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pembinaan olah-raga yang berjenjang mulai dari tingkat sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas untuk menjangring atlit.
- 2) Mengintensifkan event-event olahraga untuk mendapatkan potensi baru dalam bidang olahraga.
- 3) Meningkatkan keikutsertaan atlet-atlet lokal pada berbagai event olahrag baik di level lokal antar daerah maupun internasional.
- 4) Mengembangkan dan memperbaiki sarana dan prasarana olahraga dilingkungan masyarakat, baik di level kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota.
- 5) Pendataan pemuda wirausaha sebanyak 866 orang yang memiliki NIB dan pemuda aktif organisasi sebanyak 19443 orang
- 6) Pelatihan wirausaha khusus yang ber NIB dengan pelatihan manajemen OKP (sosialisasi edukasi)

f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:



Tabel 3.13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran Strategis: Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Anggaran	Realisasi	Capaian	
Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	8.486.720.306	8.386.212.720	98,82	99,09%
	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	592.894.000	528.145.275	89,08	99,18%
	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	2.714.921.600	2.656.547.800	97,85	99,10%

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga sebesar 99,10%.

g. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya mendukung indikator ini program/kegiatan yang mendukung antara lain sebagai berikut:

- **Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
 - 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan terdiri dari 4 kegiatan dengan sasaran kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, penyelenggaraan kejuaran olahraga tingkat daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
 - 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan diarahkan pada kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota, dengan capaian program Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
 - 3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi dan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.



4. Sasaran Strategis: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.

Sasaran Strategis 4 (empat) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Angka Harapan Hidup dan Laju Pertumbuhan Penduduk.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 4 (empat) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Angka Usia Harapan Hidup adalah:

- a. Menurunnya angka kesakitan dan kematian dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):
 - Angka Kematian Ibu;
 - Angka Kematian Bayi;
 - Prevalensi Balita Gizi Buruk;
 - Sukses Rate TB;
 - Prevalensi Hipertensi Penduduk Usia diatas 15 tahun.
- b. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):
 - Persentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama;
 - Peringkat Kelulusan Akreditasi RSUD.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah: **Dinas Kesehatan**

1. **Angka Harapan Hidup**

Definisi Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Angka Harapan Hidup merupakan angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan nilai pola mortalitas menurut umur. Perhitungan Angka Harapan Hidup dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.

2. **Laju Pertumbuhan Penduduk**

Definisi Laju Pertumbuhan Penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk dilaksanakan oleh BPS dengan formulasi sebagai berikut :

$$r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{1/t} - 1$$

Metode geometri

r : Laju pertumbuhan penduduk

P_t : Jumlah penduduk tahun t

P₀ : Jumlah penduduk tahun awal

t : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

Selengkapnya analisa terhadap capaian sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk tahun 2024 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisa sebagai berikut:

a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Target sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk tahun 2024 bila dibandingkan antara target dan realisasi tahun 2024 1 indikator kinerja dapat tercapai 100% sedangkan 1 indikator belum bisa meemnuhi dari yang ditargetkan, selanjutnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.14

Realisasi Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja 2024
Angka Harapan Hidup	77,78	77,93	100,19
Laju Pertumbuhan Penduduk	1,32	1,18	89,39

Sumber: BPS

b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Realisasi indikator kinerja Angka Harapan Hidup pada tahun 2024 adalah 77,93 masih menggunakan data realisasi tahun 2023 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 mengalami penurunan. Realisasi indikator laju pertumbuhan penduduk tahun 2024 adalah 1,18 bila dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 1,21 mengalami penurunan sedangkan capaian 2024 adalah 89,39 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 109,70, selanjutnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.15

Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup	77,72	77,93	77,93	100,41	100,33	100,19
Laju Pertumbuhan Penduduk	0,80	1,21	1,18	139,39	109,70	89,39

Sumber: BPS

c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).**

Realisasi Sasaran strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk tahun 2024 adalah sudah terdapat 1 indikator yang memenuhi target RPD yaitu Angka harapan Hidup sedangkan 1 indiktor belum memenuhi target yang ditetapkan. Adapun data dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.16
Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPD
Sasaran Strategis: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan
Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2024	Target Akhir RPD 2026
Angka Harapan Hidup	77,93	77,98
Laju Pertumbuhan Penduduk	1,18	1,30

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Berdasarkan data BPS tahun 2023, angka harapan hidup di Indonesia mencapai 71,85 tahun, sedangkan di Kota Salatiga Angka Harapan Hidup sudah mencapai 77,93 tahun, dengan demikian Angka Harapan Hidup penduduk Kota Salatiga lebih tinggi daripada Angka Harapan Hidup Penduduk Indonesia.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab keberhasilan tercapainya target dari indikator ini adalah:

- 1) Meningkatnya Kesehatan ibu dan bayi.
- 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- 3) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat
- 4) Faktor-faktor signifikan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk antara lain kelahiran, kematian dan perpindahan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.17
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran Strategis: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan
Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Anggaran	Realisasi	Capaian	
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	50.554.026.011	45.419.855.641	89,84	99,05%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	603.041.000	570.408.000	94,59	99,00%
	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	448.337.000	432.192.850	96,40	98,98%



Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Anggaran	Realisasi	Capaian	
	Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	1.249.149.596	1.243.539.532	99,55	98,95%
	Pengendalian Penduduk	593.898.300	550.236.720	92,65	99,02%
	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.625.541.279	1.896.907.625	72,25	99,24%
	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	812.805.000	803.103.800	98,81	98,96%

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk sebesar 99,06%.

g. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target Angka Usia Harapan Hidup, di dukung oleh program sebagai berikut:

- **Dinas Kesehatan**
 - 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang diarahkan kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi, penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kota.
 - 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang diarahkan pada kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat Kota.
 - 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang diarahkan pada kegiatan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) penerbitan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga serta penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).
 - 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang diarahkan pada kegiatan dengan sasaran kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral tingkat Kota dan



pelaksanaan kesehatan dalam rangka promotif preventif tingkat Kota.

5. Sasaran Strategis: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.

Sasaran strategis 5 (lima) Menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan per kapita.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 5 (lima) adalah

- a. Meningkatnya jumlah koperasi aktif dengan (IKD) Persentase koperasi aktif;
- b. Meningkatnya jumlah UKM dengan (IKD) Persentase Usaha Mikro dan Kecil.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah: **Dinkop Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

- c. Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas dengan IKD:
 - 1) Persentase pertumbuhan IKM (industry kecil menengah);
 - 2) Kontribusi sector industry terhadap PDRB

- d. Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja dengan IKD Tingkat Produktivitas tenaga Kerja

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah: **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

- e. Meningkatnya pendapatan daerah dengan IKD Persentase Peningkatan PAD terhadap pendapatan

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah: **Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**

- f. Meningkatnya kinerja perdagangan dengan IKD Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah: **Dinas Perdagangan**

- g. Meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan dengan IKD
 - 1) Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara;
 - 2) Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara;
 - 3) Tingkat hunian akomodasi;
 - 4) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku;
 - 5) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah: **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

- h. Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta katahanan pangan masyarakat dengan IKD
 - 1) Pruduktivitas padi;
 - 2) Peningkatan produktivitas tananman hortikultura;
 - 3) Peningkatan produktivitas peternakan daging sapi;
 - 4) Produktivitas Sapi perah;
 - 5) Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi);
 - 6) Peningkatan produksi perikanan (benih);

- 7) Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis;
- 8) Ketersediaan beras.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah: **Dinas Pangan dan Pertanian**

1. **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam produksi barang dan jasa secara keseluruhan dalam suatu wilayah dalam suatu periode waktu tertentu.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Pertumbuhan ekonomi dilaksanakan oleh BPS dengan formulasi sebagai berikut :

$$Pertumbuhan\ Ekonomi = \frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_t}{PDRB_t} \times 100\%$$

Dimana:

t+1 = tahun pengamatan PDRB

t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya

2. **Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHK)**

Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHK) mengukur nilai produksi barang dan jasa di suatu daerah dalam satu periode waktu tertentu (biasanya satu tahun) dengan menggunakan harga tahun dasar yang tetap atau konstan.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHK) dilaksanakan oleh BPS dengan formulasi sebagai berikut :

$$PDRB\ per\ kapita = \frac{PDRB}{\sum penduduk} \times 100\%$$

Selengkapnya analisa terhadap capaian Sasaran Strategis Menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk tahun 2024 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Sasaran menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk tahun 2024 ini kedua Indikator Kinerja Utama dapat tercapai sesuai target yang ditentukan, dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.18
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2024	Realisasi 2024
Pertumbuhan Ekonomi	4,84	4,48
Pendapatan Per Kapita	55,8	57,82



b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.**

Realisasi kinerja pada Sasaran Menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk tahun 2024 realisasi dan capaian terus mengalami kenaikan dan dapat terealisasi melebihi dari target yang ditentukan, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realiasi Kinerja			Capaian Kinerja		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi	5,53	5,34	4,48	101,47	113,38	114,44
Pendapatan Per Kapita	NA	54,89	57,82	NA	109,70	103,62

Sumber: BPS

c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).**

Realisasi Sasaran Menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk tahun 2024 dengan target RPD 2026 untuk indikator ini ditahun kedua sudah tercapai target yang ditentukan.

Tabel 3.20
Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPD
Sasaran Strategis: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2024	Target Akhir RPD 2026
Pertumbuhan Ekonomi	5,34	5,00
Pendapatan Per Kapita	57,82	59,16

d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**

- 1) Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada 2024 tercatat sebesar 5,54% masih lebih tinggi dibandingkan Pertumbuhan Ekonomi nasional sebesar 5,05%.
- 2) Pendapatan per kapita kota Salatiga Tahun 2024 tercatat sebesar 86,18%

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah:

- 1) Kondisi sosial yang stabil dan kualitas hidup yang tinggi dapat menciptakan lingkungan yang menarik bagi penduduk dan pengusaha untuk tinggal dan berinvestasi.
- 2) Mendorong inovasi dan kewirausahaan sehingga menciptakan lapangan kerja, produk dan layanan baru, serta meningkatkan daya saing.
- 3) Kemitraan yang kuat antara pemerintah kota, swasta, dan 45

non-pemerintah sehingga memobilisasi investasi dan sumber daya yang diperlukan.

- 4) Kebijakan atau regulasi yang mendukung investasi, inovasi, dan pengembangan sektor ekonomi.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.21
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran Strategis: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Anggaran	Realisasi	Capaian	
Menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	56.032.900	54.689.600	97,60	99,00%
	Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi	54.852.000	53.504.000	97,54	99,01%
	Pendidikan dan Latihan perkoperasian	256.186.200	249.720.866	97,48	99,01%
	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	161.743.000	159.802.500	98,80	98,99%
	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dann usaha mikro	1.224.169.564	1.201.153.450	98,12	99,00%
	Hubungan industrial	266.692.200	250.427.000	93,90	99,04%
	Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	1.310.000.000	1.251.035.266	95,50	99,03%
	Penempatan tenaga kerja	217.910.100	207.956.100	95,43	99,03%
	Pengelolaan keuangan daerah	3.593.205.000	2.378.570.990	66,20	99,33%
	Pengelolaan barang milik daerah	1.540.593.000	1.381.988.258	89,70	99,09%
	Pengelolaan pendapatan daerah	2.868.878.000	1.750.202.814	61,01	99,38%
	Perizinan dan pendaftaran perusahaan	7.225.000	7.224.000	99,99	98,98%
	Peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan	4.105.254.850	3.931.573.344	95,77	99,02%
	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	45.777.400	41.804.500	91,32	99,07%
	Pengembangan ekspor	82.796.500	82.796.500	100	98,98%
	Standarisasi dan perlindungan konsumen	30.573.500	26.977.750	88,24	99,10%
	Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata	610.232.790	439.741.900	72,06	99,27%
	Pemasaran pariwisata	1.319.585.593	901.379.075	68,31	99,30%
	Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	23.477.200	22.671.300	96,57	99,02%

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Anggaran	Realisasi	Capaian	
	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	19.219.000	15.080.000	78,46	99,20%
	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	138.864.700	88.214.700	63,53	99,35%
	Penyuluhan pertanian	580.151.800	301.599.800	51,99	99,47%
	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	58.157.800	42.955.400	73,86	99,25%
	Pengelolaan perikanan budidaya	106.890.500	104.250.100	97,53	99,01%
	Pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	31.538.000	31.537.900	100	98,98%
	Penegndalian Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner	222.288.422	158.753.200	71,42	99,27%
	Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	7.190.600	6.665.000	92,69	99,06%
	Pengawasan keamanan pangan	60.233.000	43.480.613	72,19	99,26%
	Penanganan kerawanan pangan	17.548.000	15.300.000	87,19	99,11%

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian Sasaran Menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk sebesar 99,19%.

g. Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator sasaran ini adalah:

- **Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**
 - 1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yang diarahkan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian program Persentase koperasi yang berkualitas.
 - 2) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang diarahkan pada kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian progam Persentase KSP/USP koperasi sehat, dengan indikator kinerja Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian.
 - 3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yang diarahkan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian progam Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan.



- 4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, capaian program ini yaitu persentase akses pasar anggota koperasi.
 - 5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) yang iarahkan pada kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang dilakukan untuk mencapai indikator program persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan.
- **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**
 - 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan sasaran pada kegiatan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi, pembinaan 48ariabl pelatihan swasta.
 - 2) Program Penempatan Tenaga Kerja dengan sasaran pada kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja, perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan), dan Penertiban Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 daerah.
 - 3) Program Hubungan Industrial dengan sasaran kegiatan pengesahan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja 48ariabl untuk perusahaan dan kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.
 - **Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**
 - 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sasaran kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah.
 - 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sasaran kegiatan pengelolaan barang milik daerah untuk mencapai indikator kinerja program Asset Management.
 - 3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan sasaran kegiatan pengelolaan pendapatan daerah dengan capaian program Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD.
 - **Dinas Perdagangan**
 - 1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan sasaran kegiatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha 48ari swalayan, penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri, dan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat.



- 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan sasaran kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat.
 - 3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan sasaran kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar serta pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah.
 - 4) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan sasaran kegiatan pelaksanaan metrologo legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
 - 5) Program Pemasaran ekspor dengan sasaran kegiatan pelaksanaan promosi melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan.
- **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**
 - 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang diarahkan pada kegiatan pengelolaan 49 variabel strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota dengan capaian program jumlah objek wisata.
 - 2) Program Pemasaran Pariwisata yang diarahkan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan capaian program jumlah kegiatan/fasilitasi pemasaran pariwisata.
 - 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang diarahkan pada kegiatan Pengembangan Ekosistem ekonomi kreatif dengan capaian program Jumlah kegiatan pengelolaan ekonomi kreatif.
 - 4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dengan capaian program jumlah peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
 - **Dinas Pangan dan Pertanian**
 - 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yang diarahkan pada kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan untuk mencapai target kinerja penyediaan infrastruktur pangan.
 - 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan yang diarahkan pada kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota untuk mencapai target indikator kinerja penanganan rumah tangga rawan pangan.
 - 3) Program Pengawasan Keamanan Pangan yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota untuk mencapai target pangan segar.



- 4) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, pengelolaan pembudidayaan ikan dengan capaian program capaian bina kelompok pembudidaya ikan dan presentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
- 5) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan yang diarahkan pada kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil dengan capaian program cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan dan presentase kelompok kelompok pengelola dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
- 6) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang diarahkan pada kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan sumber daya 50 variabel (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota, peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain, dengan capaian program Pemenuhan Kebutuhan sarana pertanian,
- 7) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang diarahkan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian dengan capaian program Pemenuhan Kebutuhan prasarana pertanian.
- 8) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota dengan capaian program jumlah kejadian bencana pertanian.
- 9) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diarahkan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota; Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan dengan capaian program Mortalitas Hewan/ternak akibat penyakit zoonosis.
- 10) Program Penyuluhan Pertanian yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan capaian program Cakupan Bina Kelompok Tani untuk Pemula, Lanjut, Madya dan Utama.



6. **Sasaran Strategis: Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan Kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga.**

Sasaran Strategis 6 (enam) mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan Kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu pertumbuhan nilai investasi, Tingkat pengangguran terbuka dan Tingkat partisipasi Angkatan kerja.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 6 (enam) adalah:

- a. Meningkatnya capaian realisasi PMA dan PMDN dengan 51variable indikator Kinerja Daerah (IKD):
 - 1) Persentase kenaikan jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)
 - 2) Persentase kenaikan nilai investasi PMDN
 - 3) Persentase kenaikan nilai investasi PMA

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran ini adalah: **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

- b. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja dengan 51variable Indikator Kinerja Daerah (IKD): Persentase pencari kerja yang ditempatkan.
- c. Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja dengan variable Indikator Kinerja Daerah (IKD):
 - 1) Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin
 - 2) Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu tenaga kerja

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah: **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

1. **Pertumbuhan Nilai Investasi**

Pertumbuhan nilai investasi adalah peningkatan dalam jumlah atau nilai total investasi yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah, atau individu dalam suatu periode waktu tertentu. Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Pertumbuhan nilai investasi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan formulasi sebagai berikut :

Pertumbuhan Nilai Investasi

$$= \frac{\text{Realisasi Investasi Tahun Evaluasi} - \text{Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya}}{\text{Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

2. **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah ukuran persentase dari jumlah orang yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil



menemukannya dalam suatu populasi tertentu, seperti populasi pekerja atau angkatan kerja
Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dengan formulasi sebagai berikut :

Tingkat Pengangguran Terbuka

$$= \frac{\text{jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$$

- 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan proporsi dari populasi usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik dalam pekerjaan yang dipekerjakan maupun mencari pekerjaan.
Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dengan formulasi sebagai berikut :

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

$$= \frac{\text{jumlah penduduk bekerja}}{\text{jumlah penduduk usia kerja}} \times 100\%$$

Selengkapnya analisa terhadap capaian sasaran strategis mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan Kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga tahun 2024 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
Target indikator pada sasaran mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan Kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis: Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah yang Mendorong pada Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Pelaku Investasi dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Salatiga

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2024	Realisasi 2024
Pertumbuhan Nilai Investasi	10,22	6,89
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,52	3,86
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,84	70,72

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**
Realisasi kinerja sasaran mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar

daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun lalu terus mengalami peningkatan kinerjanya.

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah yang Mendorong pada Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Pelaku Investasi dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Salatiga

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pertumbuhan Nilai Investasi	NA	52,17	6,89	NA	521,70	67,42
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,58	4,57	3,86	102,62	132,40	129,95
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	NA	72,09	70,72	NA	103,41	101,26

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Realisasi kinerja untuk sasaran mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga tahun 2024 hanya 1 indikator yang sudah memenuhi target akhir RPD sedangkan 2 indikator di tahun kedua ini belum bisa memenuhi target, Adapun data dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.24
Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPD
Sasaran Strategis: Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah yang Mendorong pada Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Pelaku Investasi dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Salatiga

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2024	Target Akhir RPD 2026
Pertumbuhan Nilai Investasi	6,89	10,55
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,86	6,12
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,72	70,1

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada target standar nasional

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan indikator ini antara lain:

- 1) Menurunnya jumlah pengangguran
- 2) Kenaikan kebutuhan tenaga kerja di sector industry
- 3) Bertambahnya jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja
- 4) Melaksanakan koordinasi yang intensif secara vertical dan horizontal dengan stakeholder dan mitra Lembaga



pemberdayaan sosial dalam pelaksanaan penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan:

- 5) Pemberian perlindungan dan jaminan sosial termasuk penyaluran bantuan sosial
- 6) Penangan regabilitasi sosial pemerlu kesejahteraan

Analisis penyebab kegagalan indikator Pertumbuhan nilai investasi antara lain:

- 1) Realisasi investasi baik PMA/PMDN bergantung pada pelaporan dari pelaku usaha
- 2) Pada tahun 2024 ada beberapa pelaku usaha yang akan menambahkan investasi namun terkendala dengan aturan RTRW
- 3) Pelaku usaha tidak melakukan penambahan investasi berupa modal/asset tetap
- 4) Penambahan modal kerja yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak diperhitungkan sebagai penambahan realisasi investasi

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja yang akan datang diantaranya dengan memberikan insentif penanaman modal, meningkatkan promosi investasi, pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam melaksanakan penanaman modal, memperkuat data peluang investasi yang prospektif untuk dikembangkan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.25
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran Strategis: Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah yang Mendorong pada Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Pelaku Investasi dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Salatiga

Sasaran	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Anggaran	Realisasi	Capaian	
Pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan Kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Pengembangan iklim penanaman modal	122.344.000	115.723.750	94,59	99,08%
	Promosi penanaman modal	97.207.500	92.050.000	94,69	99,08%
	Pelayanan penanaman modal	60.339.318	59.320.000	98,31	99,05%
	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	397.240.000	312.628.600	78,70	99,24%
	Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	0	0	0	0%
	Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	1.310.000.000	1.251.035.266	95,50	99,07%
	Penempatan tenaga kerja	217.910.000	207.956.100	95,43	99,07%
	Perencanaan dan pembangunan industri	2.775.965.583	2.246.848.750	80,94	99,22%

Sasaran	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Anggaran	Realisasi	Capaian	
	Pengendalian izin usaha industry kabupaten/kota	31.415.000	31.415.000	100	99,03%
	Pengelolaan sistem informasi industry nasional	189.338.000	184.602.000	97.50	99,05%
	Pembangunan Kawasan transmigrasi	0	0	0	0%

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian Sasaran mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga sebesar 99,15%.

g. Analisis program yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target indikator Pertumbuhan nilai investasi di dukung oleh Program antara lain:

- **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
 - 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan sasaran kegiatan pembuatan dokumen pendukung iklim penanaman modal.
 - 2) Program Promosi Penanaman Modal dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
 - 3) Program Pelayanan Penanaman Modal dengan sasaran kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal.
 - 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan sasaran kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
 - 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan sasaran kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi.

7. Sasaran Strategis: Meningkatkan Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.

Sasaran Strategis 7 (tujuh) Meningkatkan Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. **Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS;**

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 7 (tujuh) adalah meningkatnya kualitas penduduk terdata dalam DTKS dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut:



- a. Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani;
 - b. Angka Kemiskinan.
- Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah: **Dinas Sosial**
- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan formulasi sebagai berikut :

Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS

$$= \frac{\text{Jumlah penduduk terdata dalam DTKS}}{\text{Jumlah seluruh penduduk yang memenuhi}} \times 100\%$$

2. **Pola Pangan Harapan;**
- Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 7 (tujuh) adalah meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut:
- a. Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan;
 - b. Ketersediaan energi per kapita;
 - c. Ketersediaan protein per kapita.
- Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah: **Dinas Pangan dan Pertanian**
- Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan di wilayah tertentu. PPH mengelompokkan pangan menjadi 9 kelompok yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, minyak dan lemak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, serta aneka bumbu dan bahan minuman.
- Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Pola Harapan Pangan dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Pola Pangan Harapan} = \text{Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG)} \times \text{bobot tiap kelompok pangan}$$

3. **Persentase Peminat Transmigrasi.**
- Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 7 (tujuh) adalah Meningkatnya minat untuk menjadi transmigrasi dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) yaitu Persentase peningkatan peminat transmigrasi.
- Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah: **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**
- Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Persentase Peminat Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas



Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Persentase Peminat Transmigrasi} = \frac{\text{Jumlah calon transmigran yang berminat}}{\text{Peserta penyuluhan catran}} \times 100\%$$

Selengkapnya analisa terhadap capaian Meningkatkan Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial tahun 2024 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
Target Sasaran Kinerja Meningkatkan Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial Tahun 2024 untuk capaian IKU dapat tercapai dari target yang ditentukan.

Tabel 3.26
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2024	Realisasi Kinerja 2024
Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	95	97,01
Pola Pangan Harapan	94,4	94,4
Persentase Peminat Transmigrasi	3,7	20

- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.**
Realisasi kinerja untuk Sasaran Kinerja Meningkatkan Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial tahun 2024.

Tabel 3.27
Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
	2023	2024	2023	2024
Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	94,56	97,1	100,06	100
Pola Pangan Harapan	100,22	94,4	100,22	97,97
Persentase Peminat Transmigrasi	25	20	757,58	540,54

Pola pangan harapan 2021: 94,1 2022: 95,1/bps th 2023/2024 perhitungan mandiri berdasarkan data primer.

- c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**
Realisasi kinerja untuk indikator Sasaran Kinerja Meningkatkan Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial tahun 2024 dari 3 indikator ini

sudah dapat tercapai di tahun kedua, dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 3.28
Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPD
Sasaran Strategis: Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat dalam
Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Kinerja 2024	Target Akhir RPD 2026
Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	97,01	96
Pola Pangan Harapan	92,48	98,8
Persentase Peminat Transmigrasi	20	4,6

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

DTKS: capaian pelaksanaan SPM 100% sesuai permensos no 9 th 2018 target minimal 80%

Pola pangan harapan: 94,0 (nasional) Jawa Tengan 94,5

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan indikator ini antara lain:

- 1)

Melaksanakan koordinasi yang intensif secara vertical dan horizontal dengan stakeholder dan mitra Lembaga pemberdayaan sosial dalam pelaksanaan penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan:
- 2)

Pemberian perlindungan dan jaminan sosial termasuk penyaluran bantuan sosial
- 3)

Penangan regabilitasi sosial pemerlu kesejahteraan
- Upaya perbaikan yang akan dilakukan antara lain:

- 1)

Pelatihan PRSE dengan kegiatan palatihan tuna sosial dan pemberian bantuan

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.29
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran Strategis: Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat dalam
Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Anggaran	Realisasi	Capaian	
Meningkatkan Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Pemberdayaan Sosial	622.360.576	611.808.371	98,30	99,60%
	Rehabilitasi Sosial	1.168.148.000	1.134.543.782	97,12	99,61%
	Perlindungan dan jaminan sosial	1.345.003.000	1.258.204.436	93,55	99,62%
	Penanganan Bencana	38.803.000	38.691.000	99,71	99,60%
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	139.529.548	137.828.913	98,78	99,60%

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Anggaran	Realisasi	Capaian	
	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	860.976.400	811.443.250	94,25	99,62%
	Pembangunan Kawasan transmigrasi	0	0	0	

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian Meningkatkan Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial sebesar 99,08%.

g. Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS antara lain:

- Dinas Sosial**
 - Program Pemberdayaan Sosial dengan sasaran kegiatan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial untuk mencapai indikator kinerja persentase terbentuknya lembaga Puskesmas, persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment, persentase PSKS yang dibina.
 - Program Rehabilitasi Sosial dengan sasaran kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
 - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan sasaran kegiatan pengelolaan data fakir miskin.
 - Program Penanganan Bencana dengan sasaran kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.
 - Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan sasaran kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kota
- Dinas Pangan dan Pertanian**
 - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan sasaran kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Dinas Pangan dan Pertanian**
 - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan sasaran kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.



8. Sasaran Strategis: Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Sasaran Strategis 8 (delapan) Meningkatkan perlindungan pemenuhan hah-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Score capaian KLA

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan/sasaran strategis 8 (delapan) adalah Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):

- a. Persentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan;
- b. Persentase perempuan yang menjadi anggota legislative.

Kota Layak Anak merupakan Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi skor KLA dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan formulasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Skor KLA} = & \text{Skor Aspek Kelembagaan} + \text{Skor Nilai Kluster 1} \\ & + \text{Skor Nilai Kluster 2} + \text{Skor Nilai Kluster 3} \\ & + \text{Skor Nilai Kluster 4} + \text{Skor Nilai Kluster 5} \\ & + \text{Skor Nilai Kecamatan / Desa} \\ & / \text{Kelurahan Layak Anak} \end{aligned}$$

2. IDG

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan/sasaran strategis 8 (delapan) adalah Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG diukur dalam tiga dimensi yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur nilai IDG dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{IDG} = \frac{I_{(\text{par})} + I_{(\text{DM})} + I_{(\text{inc-des})}}{3}$$



3. IPG

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan/sasaran strategis 8 (delapan) adalah Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk melihat pencapaian laki-laki dan perempuan yang dilihat dari tiga aspek dasar seperti IPM yaitu usia panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur nilai IPG dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dengan formulasi sebagai berikut :

$$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L} \times 100$$

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 8 (delapan) adalah: **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Meningkatkan perlindungan pemenuhan hah-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender tahun 2025 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Target Sasaran Meningkatkan perlindungan pemenuhan hah-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender tahun 2024 terdiri dari 3 indikator kinerja masih belum tercapai 100%, untuk realisasi 2024 masih menggunakan data BPS tahun 2023 dan menunggu hasil penilaian dari pusat capain 2024 masih menunggu rilis, Adapun data dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.30
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2024	Realisasi Kinerja 2024
Skor capaian KLA	620	611
IDG	80,05	79,48
IPG	95,5	95,45

b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Realisasi sasaran kinerja Meningkatkan perlindungan pemenuhan hah-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dari tahun 2024 dapat tercapai 100% bila dibandingkan dengan tahun 2023 masih terdapat 1 indikator yang belum bisa tercapai.

Tabel 3.31

Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
	2023	2024	2023	2024
Skor capaian KLA	611	611	99,35	98,55
IDG	79,48	79,48	99,35	98,73
IPG	95,45	95,45	100,47	99,95

c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Realisasi Meningkatkan perlindungan pemenuhan hah-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender tahun 2024 ditahun kedua RPD ini 2 indikator kinerja sudah tercapai dari target akhir RPD 2026 sedangkan 1 indikator belum memnuhi target akhir yang ditetapkan.

Tabel 3.32

Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPD

Sasaran Strategis: Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Kinerja 2023	Target Akhir RPD 2026
Skor capaian KLA	97,01	96
IDG	92,48	98,8
IPG	20	4,6

d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**

Pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013, standar nasional skor kota layak anak adalah 1000, maka jika dibandingkan dengan skor capaian tahun 2024 sebesar 611, Kota Salatiga masih perlu meningkatkan kinerjanya untuk mencapai standar nasional yang telah ditetapkan.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Pencapaian skor capaian KLA tidak terlepas dari peran semua Perangkat Daerah dan stakeholder terkait dilingkungan Kota Salatiga dalam mendukung pengisian dan verifikasi data kota layak anak serta peran aktif rumanksa sebagai forum anak Kota Salatiga dalam kegiatan yang diadakan.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian kota layak anak yaitu:

- 1) Advokasi pendidik sebagai upaya pencegahan kekerasan pada anak di sekolah
- 2) Penanganan kasusu kekerasan pada anak
- 3) Orientasi system perlindungan anak (SPA) bagi aparat kelurahan dan kecamatan

- 4) Lokakarya disiplin positif menuju sekolah ramah anak (SRA)

5) Pembentukan rumah ibadah anak

6) Pembentukan forum anak sampai ke tingkat kelurahan

7) Pembentukan kelurahan layak anak

8) Sosialisasi pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta kasih sayang dalam keluarga

f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**
Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.33
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran Strategis: Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Anggaran	Realisasi	Capaian	
Meningkatkan perlindungan pemenuhan hah-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	275.783.000	261.327.000	94,76	98,98%
	Perlindungan perempuan	301.034.000	170.306.865	56,57	99,39%
	Peningkatan kualitas keluarga	694.509.700	663.728.550	95,57	98,97%
	Pengelolaan sistem data gender dan anak	0	0	0	0%
	Pemenuhan hak anak	330.403.900	304.950.900	92,30	99,00%
	Perlindungan khusus anak	280.425.500	199.972.085	71,31	99,23%

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian Meningkatkan perlindungan pemenuhan hah-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender sebesar 99,08%.

g. **Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**
Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Skor Capaian KLA antara lain:

- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

1) Program Perlindungan Khusus Anak dengan sasaran kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

2) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan sasaran kegiatan pelembagaan pemenuhan hak anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.

3) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan sasaran kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak.



- 4) Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan sasaran kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak.

9. Sasaran Strategis: Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Sasaran strategis 9 (sembilan) Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah hanya terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas yang termuat di dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur Indeks Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 9 (sembilan) adalah Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan public dan tatakelola pemerintahan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik;
3. Indeks Kematangan organisasi Daerah;
4. Indeks PMPRB;
5. Nilai SAKIP;

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah: **Sekretariat Daerah**

6. Indeks Inovasi;
7. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan;
8. Penjabaran konsistensi program RPD ke dalam RKPD;

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah: **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

9. Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah: **Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**

10. Indeks Profesionalitas ASN

11. Nilai system Merit

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah: **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**



- 12. QA SPIP
- 13. QA IEPK (indeks efektifitas pengendalian korupsi)
- 14. QA MRI (Manajemen Resiko Indeks)
- 15. Kapabilitas APIP
- Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah: **Inspektorat Daerah**
- 16. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntanilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional
- Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah: **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
- 17. Indeks SPBE
- 18. Persentase ketersediaan data statistik sektoral
- 19. Tingkat keterbukaan informasi publik
- 20. Tingkat Pengamanan informasi daerah
- Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah: **Dinas Komunikasi dan Informatika**
- 21. Persentase cakupan akta kelahiran (0-18th)
- 22. Persentase penduduk ber KTP elektronik
- 23. Persentase anak 0-17 th kurang 1 hari yang memiliki KIA
- Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah: **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
- 24. Nilai Indeks kepuasan Masyarakat
- 25. Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2
- 26. Persentase realisasi usulan hasil musrenbang
- 27. Persentase PKK aktif
- Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah: **Kecamatan**
- 28. Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah: **Sekretariat DPRD**

Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
Target Sasaran Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah tahun 2024 sebesar 67,00 sedangkan realisasi sebesar 80,21 sehingga capaian kinerja adalah 119,71% dengan kategori Sangat Baik.

Tabel 3.34
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2024	Realisasi 2024
Indeks Reformasi Birokrasi	67,00	80,21

- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.**
Realisasi Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah tahun 2024 sebesar 80,21 tahun 2023 adalah 64,93 tahun 2022 adalah 66, 85 dan tahun 2021 adalah 66,00

dan sedangkan capaian kinerjanya tahun 2023 adalah 99,13 dan tahun 2024 adalah 119,71%, maka apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya indeks reformasi birokrasi tahun 2024 mengalami kenaikan. Data terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.35
Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
	2023	2024	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	64,93	80,21	96,61	117,71

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Realisasi Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah tahun 2024 adalah 80,21 sedangkan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 70,00 dengan demikian target akhir Indeks Reformasi Birokrasi di tahun kedua RPD sudah tercapai.

Tabel 3.36
Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPD
Sasaran Strategis: Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Kinerja 2024	Target Akhir RPD 2026
Indeks Reformasi Birokrasi	80.21	70,00

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional untuk Indeks Reformasi Birokrasi.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan indikator ini dikarenakan:

- 1) Koordinasi dengan PD pengampu RB
- 2) Penyesuaian terhadap Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map RB 2020-2024.
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai Road Map RB Kota Salatiga

Upaya yang dilakukan untuk mendorong tercapainya terget Indek Reformasi Birokrasi

- 1) Koordinasi dengan semua perangkat daerah terkait untuk meningkatkan capaian reformasi birokras.i
- 2) Menindak lanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Kemenpan RB.
- 3) Meningkatkan capain per indikator dengan Kerjasama dengan semua pihak terkait.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan kelompok kerja Reformasi Birokrasi.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.37

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis: Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Anggaran	Realisasi	Capaian	
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Administrasi umum	736.532.106.312			
	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.890.700.700	1193.334.222	63,12	99,47%
	Perekonomian dan Pembangunan	938.139.500	281.814.800	30,04	99,75%
	Aplikasi Informatika	2.290.459.851	2.246.301.800		99,18%
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	584.184.700	572.045.956	97,92	99,18%
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	198.635.300	191.330.000	96,32	99,20%
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	40.149.000	30.660.000	76,37	99,36%
	Pendaftaran Penduduk	635.940.116	556.463.620	87,50	99,27%
	Pencatatan Sipil	71.912.000	50.750.000	70,57	99,41%
	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	63.700.000	59.328.600	93,14	99,22%
	Kepegawaian Daerah	1.043.485.170	704.539.684	67,52	99,44%
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.463.182.800	1.418.387.403	96,94	99,19%
	Penyelenggaraan Pengawasan	104.037.000	26.523.750	25,49	99,79%
	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	914.822.904	673.233.800	73,59	99,39%
	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	813.108.700	505.024.400	62,11	99,48%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.037.080.800	1.006.962.045	97,10	99,19%
	Penelitian dan Pengembangan Daerah	114.915.700	54.498.500	47,42	99,60%
	Pengelolaan Arsip	500.400.250	489.421.625	97,81	99,18%
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	0	0	0	0%

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Anggaran	Realisasi	Capaian	
	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	22.874.135.523	21.849.511.577	95,52	99,20%
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	122.225.000	115.343.700	94,37	99,21%
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.740.527.794	6.546.193.360	97,12	99,19%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	389.332.000	379.688.480	97,52	99,19%
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	105.948.100	100.851.500	95,19	99,20%

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian sasaran meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebesar 99,96%.

g. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi, terdapat beberapa program yang mendukung antara lain:

- **Sekretariat Daerah**
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diarahkan kegiatan pada perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah; administrasi keuangan perangkat daerah; administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah; administrasi kepegawaian perangkat daerah; administrasi umum perangkat daerah; pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah; penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah; administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah; fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah; penataan organisasi; pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan.
 - 2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan sasaran kegiatan administrasi tata pemerintahan, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, fasilitasi dan koordinasi hukum dan fasilitasi kerja sama daerah.
 - 3) Program Perekonomian dan Pembangunan dengan sasaran kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian, pelaksanaan administrasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam.



- **Dinas Komunikasi dan Informatika**
 1. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan sasaran kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah.
 2. Program Aplikasi Informatika dengan sasaran kegiatan pengelolaan nama domain dan sub domain serta pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah daerah.
 3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah.
 4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah.
- **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
 - 1) Program Pendaftaran Penduduk dengan sasaran kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan penataan pendaftaran penduduk.
 - 2) Program Pencatatan Sipil dengan sasaran kegiatan pelayanan pencatatan sipil dan penyelenggaraan pencatatan sipil
 - 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan sasaran kegiatan pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian *database*, penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan.
- **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
 - 1) Program Kepegawaian Daerah dengan sasaran kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.
 - 2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan sasaran kegiatan pengembangan kompetensi teknis serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.
- **Inspektorat Daerah**
 - 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.
 - 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan sasaran kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan serta kegiatan pendampingan dan asistensi.
- **Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**
 - 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sasaran kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, penunjang urusan



kewenangan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah.

- **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
 - 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan sasaran kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah.
 - 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sasaran kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA serta koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.
 - 3) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan sasaran kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi.
- **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
 - 1) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan sasaran kegiatan pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.
 - 2) Program Pengelolaan Arsip dengan sasaran kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis dan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional.
- **Sekretariat DPRD**
 - 1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan sasaran kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Peningkatan Kapasitas DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, Fasilitasi Tugas DPRD.
- **Kecamatan**
 - 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sasaran kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
 - 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan sasaran kegiatan koordinasi pemberdayaan desa dan pemberdayaan kelurahan.
 - 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
 - 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sasaran kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.



10. Sasaran Strategis: Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan.

Sasaran Strategis 10 (sepuluh) Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja Utama (IKU) yaitu

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Strategis 10 (sepuluh) adalah:

1. Cakupan Penanganan Ketentraman Kota

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Strategis 10 (sepuluh) adalah:

Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):

- a. Persentase penegakan perda dan gangguan trantibum yang diselsaikan;
- b. Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota;

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran ini adalah **Satuan Polisi Pamong Praja**

Cakupan Penanganan Ketentraman Kota merujuk pada berbagai strategi, kebijakan, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kota tetap aman, damai, dan stabil.

Pengukuran nilai Cakupan Penanganan Ketentraman Kota dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan formulasi sebagai berikut :

Cakupan Penanganan Ketentraman Kota

$$= \frac{\text{jumlah patroli} \times 3 \text{ dalam sehari}}{\text{jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

2. Penanggulungan Potensi Konflik

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Strategis 10 (sepuluh) adalah:

- a. Menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Prevalensi penyalahgunaan narkoba.
- b. Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai dan harmonis yang dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan baik social, budaya maupun pandangan politik dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): terselesainya kasus konflik horizontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya maupun politik.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran ini adalah **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Penanggulungan Potensi Konflik melibatkan serangkaian strategi dan tindakan yang dirancang untuk mencegah

timbulnya konflik atau mengelola konflik yang ada sehingga tidak berdampak negatif pada masyarakat atau lingkungan. Pengukuran dan pengolahan data Penanggulangan Potensi Konflik dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan formulasi sebagai berikut :

Penanggulangan Potensi Konflik

$$= \frac{\text{Jumlah konflik yang Tertangani}}{\text{Jumlah Konflik}} \times 100\%$$

3. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana
- Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Strategis 10 (sepuluh) adalah: Meningkatnya persentase Kelurahan Tangguh Bencana dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):
- a. Kelurahan Tangguh Bencana

b. Indeks Risiko Bencana

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran ini adalah **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah didapatkan melalui penjumlahan nilai 7 prioritas dan 71 indikator dalam tools IKD.

Selengkapnya analisa terhadap capaian sasaran Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan tahun 2024 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
- Target Sasaran Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan pada tahun 2024 dari 3 indikator bisa tercapai 100% Adapun data bisa dilihat pada table berikut:

Tabel 3.38

Realisasi Kinerja Sasaran Strategis: Menciptakan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Tentram, Tertib dan Aman Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2024	Realisasi 2024
Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	100	100
Penanggulangan Potensi Konflik	100	100
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	3,86	3,9

- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**
- Realisasi Sasaran Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan tahun 2024 dari 3 indikator dapat terealisasi 100% bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2024 sebesar

101,03 mengalami penurunan capaian dari tahun 2023 sebesar 145,83, data dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 3.39
Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Menciptakan Tataan Kehidupan Masyarakat yang Tentram, Tertib dan Aman Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
	2023	2024	2023	2024
Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	100	100	100	100
Penanggulangan Potensi Konflik	100	100	100	100
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	5,6	3,9	145,83	101,03

c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).**

Realisasi sasaran Menciptakan tataan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan tahun 2024 ini sudah terdapat 2 indikator yang sudah memenuhi target 100% dari yang ditargetkan dan terdapat 1 indikator yang belum tercapai dari target akhir RPD. Dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 3.40
Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPD
Sasaran Strategis: Menciptakan Tataan Kehidupan Masyarakat yang Tentram, Tertib dan Aman Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Kinerja 2024	Target Akhir RPD 2026
Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	100	100
Penanggulangan Potensi Konflik	100	100
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	3,46	3,9

d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**

Tidak ada standar nasional untuk indikator Cakupan Penanganan Ketentraman Kota.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Cakupan Penanganan Ketentraman Kota antara lain:

- 1) Tersedianya sarpras serta SDM yang mendukung
- 2) Komitmen bersama dalam mencapai tujuan organisasi
- 3) Koordinasi internal dengan unsur terkait
- 4) SOP dan mekanisme pelaksanaan kegiatan sudah terbangun dengan baik
- 5) Koordinasi yang intens dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam wadah kegiatan cipta kondusifitas kota Salataiga

- 6) Pemebrdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta tim penanganan konflik sosial

7) Pembinaan tentang kewaspadaan nasional kepada masyarakat serta peningkatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat

8) Tersajinya dokumen kajian risiko bencana (KRB) dan Rencana penanggulangan bencana (RPB)

9) Koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung pebnilaian Indesk Ketahanan Daerah (IKD)

Upaya perbaikan kedepan antara lain

- 1) Melakukan FGD indeks ketahanan daerah yang melibatkan perangkat daerah terkait untuk penyusunan dokumen rencana kontijensi

2) Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan kelurahan Tangguh bencana sebagai komponen kaetahanan daerah serta menurunkan indeks resiko bencana daerah dengan berbagai teknologi dan Tindakan mitigasi bencana.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.41
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran Strategis: Menciptakan Tataan Kehidupan Masyarakat yang Tentram, Tertib dan Aman Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan

Sasarann Startegis	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Anggaran	Realisasi	Capaian	
Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	2.063.468.000	1.895.125.450	91,84	99,08%
	Pencegahan, penanggulanga, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	195.000.000	163.220.600	83,70	99,17%
	Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1.731.008.000	1.639.225.300	94,70	99,06%
	Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	842.513.000	774.012.900	91,87	99,08%
	Peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	12.689.909.536	12.606.494.536	99,34	99,01%
	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	167.632.000	148.291.750	88,46	99,12%



Sasarann Startegis	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Anggaran	Realisasi	Capaian	
	Penanggulangan Bencana	1.889.965.400	1.663.198.551	88,00	99,12%
	Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi peningkatan konflik sosial	713.690.300	668.059.900	93,61	99,07%

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian sasaran Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan sebesar 99,04%.

g. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

terdapat beberapa program yang mendukung antara lain sebagai berikut:

- **Satuan Polisi Pamong Praja**
 - 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan sasaran kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan, serta pemberdayaan perlindungan masyarakat; penegakan Perda melalui penanganan pelanggaran Perda dan Perwali dan juga Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
 - 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan sasaran kegiatan pencegahan pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
 - 3) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan sasaran kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.
 - 4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sasaran kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
 - 5) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sasaran kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.
 - 6) Program Peningkatan Peran Partai Politik dalam Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan sasaran kegiatan



perumusan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

- 7) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan sasaran kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

• **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

- 1) Program Penanggulangan Bencana terdiri sasaran kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

11. Sasaran Strategis: Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata.

Sasaran 11 (sebelas) meningkatkan kulaitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata hanya terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik.

Kawasan wajah kota yang tertata merujuk pada bagian-bagian kota yang memiliki infrastruktur yang baik, tata ruang yang teratur, serta estetika yang menarik.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan formulasi sebagai berikut :

Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik

$$= \frac{\text{Ruas/lokasi terbagun}}{\text{Target ruas/lokasi penataan wajah kota}} \times 100\%$$

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan/Sasaran Strategis 11 (sebelas) adalah:

- 1. Meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik.
- 2. Meningkatnya kualitas penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Prosentase rekomendasi penyelenggaraan tata ruang.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah: **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Selengkapnya analisa terhadap capaian sasaran strategis meningkatkan kulaitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata tahun 2024 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:



- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
Target indikator Persentase Kawasan wajah kota yang tertata dengan baik tahun 2024 adalah 55% dan terealisasi sebesar 61,8% dari 17 kawasan dan terealisasi 10,5 kawasan sehingga capaian indikator kinerja sebesar 112,36% dengan Sangat Baik.

Tabel 3.42

Realisasi Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2024	Realisasi 2024
Persentase Kawasan Wajah Kota Yang Tertata Dengan Baik	55	61,8

- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Tabel 3.43

Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Kawasan Wajah Kota Yang Tertata Dengan Baik	50	58,82	61,8	66,67	112,04	108,95

Realisasi kinerja untuk indikator Persentase Kawasan wajah kota yang tertata dengan baik tahun 2024 sebesar 61,8% dan capaiannya sebesar 112,36% sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar 50% dan tahun 2022 sebesar 50% dan realisasi tahun 2023 sebesar 58,82%. Dengan demikian realisasi kinerja indikator Persentase Kawasan wajah kota yang tertata dengan baik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

- c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).**

Realisasi kinerja Persentase Kawasan wajah kota yang tertata dengan baik tahun 2024 sebesar 61,8% dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 60%, yang berarti pada tahun kedua sudah tercapai target pada akhir RPD yang ditentukan.

Tabel 3.44

Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPD
Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja 2024	Realisasi Kinerja 2024	Target Akhir RPD 2026
Persentase Kawasan Wajah Kota Yang Tertata Dengan Baik	55	61,8	60,00

- d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja Persentase Kawasan wajah kota

yang tertata dengan baik.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab tercapainya indikator Persentase Kawasan wajah kota yang tertata dengan baik antara lain:

1. Penambahan 1 ruas yaitu ruas JL.Tentara Pelajar

2. Membangun, memelihara dan meningkatkan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur umum.

3. Meningkatkan layanan izin bangunan serta pengawasan kualitas bangunan dan lingkungannya dan memfasilitasi tenga/usaha jasa kontruksi menjadi tenaga trampil bersertifikat dan paham aturan jasa kontruksi.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.45

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata

Sasaran Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Anggaran	Realisasi	Capaian	
meningkatkan kulaitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.565.238.000	10.703.187.388	101,31	99,10%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.009.507.000	6.705.952.106	95,67	99,15%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	14.779.478.277	13.282.231.771	89,87	99,20%
	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	4.991.613.338	4.403.251.450	88,21	99,21%
	Penyelenggaraan Jalan	28.295.692.000	25.864.406.453	91,41	99,19%
	Penataan Bangunan Gedung	848.765.000	743.567.000	87,61	99,22%
	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	769.663.268	767.643.268	99,74	99,11%
	Pengembangan Jasa Kontruksi	232.464.000	138.468.500	59,57	99,47%
	Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.350.000.000	1.253.900.390	92,88	99,17%

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian sasaran strategis meningkatkan kulaitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata sebesar 99,17%.

g. Analisis program yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik, terdapat beberapa program yang



mendukung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan sasaran kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota.
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan sasaran kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik melalui peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat.
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan sasaran kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik melalui peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat.
- 4) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan sasaran kegiatan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Kota, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Kota.
- 5) Program Penyelenggaraan Jalan dengan sasaran penyelenggaraan jalan Kota melalui perencanaan, pembangunan jalan dan jembatan, updating kondisi jalan dan jembatan, peningkatan struktur jalan serta melakukan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
- 6) Program Penataan Bangunan Gedung dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung melalui pemberian rekomendasi teknis IMB dan SLF.
- 7) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya.
- 8) Program Pengembangan Jasa Kontruksi dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil kontruksi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi, dan Penerbitan izin usaha jasa konstruksi Nasional.
- 9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang diarahkan pada kegiatan penataan ruang dan rencana Rinci Tata Ruang, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah.

12. Sasaran Strategis: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sasaran Strategis 12 (dua belas) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 12 (dua belas) adalah:



1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 12 (dua belas) adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Salatiga dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):

- Indeks Kualitas Air
- Indeks Kualitas udara
- Indeks Kualitas Lahan

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah **Dinas Lingkungan Hidup**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan formulasi sebagai berikut :

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

2. Rasio konektivitas kota

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 12 (dua belas) adalah meningkatnya keselamatan ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas dan Angkatan jalan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):

- Rasio Ijin Trayek
- Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah **Dinas Perhubungan**

Rasio Konektivitas Kota adalah sebuah ukuran yang menggambarkan sejauh mana sebuah kota terkoneksi baik. Ini mencakup aspek-aspek seperti infrastruktur transportasi, aksesibilitas, dan layanan publik yang tersedia bagi penduduk. Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Rasio Konektivitas Kota dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan formulasi sebagai berikut :

Rasio Konektivitas Kota

$$= \frac{\text{Jumlah Trayek yang Dilayani} \times \text{Bobot Trayek}}{\text{Jumlah Kebutuhan Trayek}} \times 100\%$$

3. Kinerja lalu lintas kota

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 12 (dua belas) adalah Rasio meningkatnya keselamatan ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas dan Angkatan jalan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Persentase Kepemilikan KIR Angkatan Umum.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 12 (Dua belas) adalah **Dinas Perhubungan**

Kinerja lalu lintas kota mencerminkan seberapa efisien dan lancarnya mobilitas kendaraan dan orang pada kota tersebut. Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Kinerja Lalu Lintas Kota dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Kinerja Lalu Lintas Kota} = \frac{V/C \text{ Rasio Ruas Jalan}}{\text{Jumlah Jalan yang Disurvei}} \times 100\%$$

Selengkapnya analisa terhadap capaian Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
Target sasaran Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan tahun 2024 dari 3 indikator kinerja dapat terealisasi 100% dari target yang ditentukan. Dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 3.46
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2024	Realisasi 2024
Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup	56,4	61,45
Rasio Konektivitas Kota	0,71	0,88
Kinerja Lalu Lintas Kota	0,4	0,31

- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.**
Realisasi Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan tahun 2024 dari 3 indikatot kinerja dapat terealisasi 100% mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dimana 1 indikator belum bisa tercapai 100%. Data terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.47
Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
	2023	2024	2023	2024
Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup	58,37	61,45	103,86	108,95
Rasio Konektivitas Kota	0,81	0,88	114,08	123,94
Kinerja Lalu Lintas Kota	0,39	0,31	88,57	122,50

- c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).**
Realisasi Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan 3 idikator kinerja tahun 2024 bila dibandingkan dengan target akhir RPD 2026 ditahun 2024 sudah tercapai ditahun kedua ini, dapat dilihat dari table berikut:



Tabel 3.48
Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPD
Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam
Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Kinerja 2024	Target Akhir RPD 2026
Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup	61,45	56,8
Rasio Konektivitas Kota	0,88	0,71
Kinerja Lalu Lintas Kota	0,31	0,5

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Target nasional Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 69,74 sedangkan realisasi kinerja IKLH Kota salatiga tahun 2024 sebesar 61,45% yang berarti masih di bawah target nasional.

Rasio konektivitas Kota dan Kinerja Lalu lintas kota tidak ada target nasional

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan sasaran Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan antara lain:

- 1) Terdapat peningkatan kualitas udara,kualitas air dan kualitas tutupan lahan di kota Salatiga
- 2) Meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah Kota Salatiga dalam hal peminaan, pengawasan ketaatan terhadap peraturan bidang lingkungan hidup
- 3) Partisipasi masyarakat dan swasta dengan ikut peduli dalam kegiatan yang mendukung peningkatan lingkungan hidup
- 4) Pengelolaan terminal penumpang tipe C berupa pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas utama dan penunjang pada terminal tamansari
- 5) Pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan baik yang didukung dengan melaksanakan pemeliharaan alat uji, kalibrasi alat uji, serta pembaharuan alat-alat uji yang sudah melebihi umur teknis maupun aplikasi yang sudah out of date hingga pelaksanaan SOP pelayanan pengujian kendaraan bermotor berkala untuk menjaga kualitas layanan uji laik jalan kendaraan bermotor
- 6) Pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada peningkatan kesadaran berlalu lintas yang berupa sosialisasi kepada masyarakat dan para pengusaha angkutan umum, operasi laik jalan, penyelenggaraan abdi yasa teladan tingkat Kota Salatiga, sarasehan dengan para pengusaha angkutan umum dan sisialisasi sadar lalu linta usia dini
- 7) Manajemen rekayasa lalu lintas dan upaya peningkatan pelayanan angkutan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan baik secara internal, perangkat daerah maupun yang bersifat kolaboratif dengan para stakeholder di lintas

OPD, lintas sectoral serta paguyuban pengusaha angkutan perkotaan.

- f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**
Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.49
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Anggaran	Realisasi	Capaian	
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Perencanaan Lingkungan Hidup	102.370.100	90.300.000	88,21	99,26%
	Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	480.112.400	435.284.250	90,66	99,23%
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	3.657.829.887	3.532.195.553	96,57	99,18%
	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	78.344.300	24.593.600	31,39	99,74%
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Lingkungan Hidup (PPLH)	63.029.000	44.546.000	70,68	99,40%
	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Untuk Masyarakat	84.023.000	38.054.300	45,29	99,62%
	Pengelolaan Persampahan	2.644.157.894	2.451.376.900	92,71	99,22%
	Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	4.555.087.148	4.545.810.953	99,80	99,16%

Sumber : Data yang diolah
Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian sasaran strategis Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sebesar 99,19%.

- g. **Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**
Dalam upaya meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, terdapat beberapa program yang mendukung antara lain sebagai berikut:

- **Dinas Lingkungan Hidup**
 - 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan sasaran kegiatan penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan indikator kinerja berupa dokumen IKPLHD dan dokumen KLHS.



- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan sasaran kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan sasaran kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati.
- 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan sasaran kegiatan pengumpulan limbah (B3).
- 5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan sasaran kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah.
- 6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan untuk Masyarakat dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan.
- 7) Program Pengelolaan Persampahan dengan sasaran kegiatan pengelolaan persampahan untuk mengurangi sampah perkotaan serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

- **Dinas Perhubungan**

- 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sasaran kegiatan penetapan rencana induk dan jaringan LLAJ, penyediaan perlengkapan jalan, pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, dan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan.

13. Sasaran Strategis: Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup.

Sasaran strategis 13 (tiga belas) Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU):

1. Persentase Rumah yang didukung oleh PSU

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 13 (tiga belas) adalah Meningkatkan kualitas PSU lingkungan perumahan dan Kawasan permukiman dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU.

Persentase rumah yang didukung oleh PSU (Penyediaan Sistem Utilitas) mengacu pada proporsi rumah atau bangunan di suatu kawasan yang menerima layanan utilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan sanitasi dari penyedia layanan utilitas yang disediakan oleh pemerintah atau pihak lainnya.



Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Persentase Rumah yang Didukung oleh PSU dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan formulasi sebagai berikut :

Persentase Rumah yang Didukung oleh PSU

$$= \frac{\text{Jumlah rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah di Kota Salatiga}} \times 100\%$$

2. **Pemukiman yang tertata**

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 13 (tiga belas) adalah

- a. Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan Kawasan permukiman dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Persentase lingkungan pemukiman kumuh.
- b. Meningkatnya pengelolaan pertanahan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Persentase luas lahan bersertifikat dan Penyesalan kasus tanah negara.

Pemukiman yang tertata merujuk pada suatu wilayah permukiman yang direncanakan dan diatur secara terorganisir dengan infrastruktur yang baik serta pemisahan fungsi lahan yang jelas. Indikator ini sering digunakan dalam konteks perencanaan perkotaan untuk menggambarkan suatu kawasan yang memiliki tata ruang yang teratur dan memadai.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Pemukiman yang Tertata dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan formulasi sebagai berikut :

Pemukiman yang Tertata

$$= \frac{\text{Luasan Permukiman yang sudah di tata}}{\text{Luas Permukiman se Kota Salatiga}} \times 100\%$$

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Sasaran Strategis 13 (tiga belas) adalah **Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman**

Selengkapnya analisa terhadap capaian sasaran Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan danpermukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Target sasaran Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan danpermukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup tahun 2024 dari 2 indikatr kinerja dapat tercapai 100% dari yang ditargetkan sehingga capaian kerjanya dengan kategori Sangat Baik.

Tabel 3.50
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Lingkungan Perumahan Danpermukiman Perkotaan yang Merata bagi Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2024	Realisasi 2024
Persentase rumah yang didukung oleh PSU	10,37	12,9
Pemukiman yang tertata	6,34	6,62

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi sasaran kinerja Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan danpermukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup tahun 2024 dari 2 indikator kinerja mangalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2023, dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 3.51
Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Lingkungan Perumahan Danpermukiman Perkotaan yang Merata bagi Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi		Capaian Kinerja	
	2023	2024	2023	2024
Persentase rumah yang didukung oleh PSU	12,47	12,9	122,25	124,40
Pemukiman yang tertata	6,34	6,62	101,28	104,42

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Realisasi sasaran kinerja Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup tahun 2024 dari 2 indkator kinerja sudah dapat tercapai ditahun kedua ini dari target RPD 2026, Adapun data dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.52
Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPD
Sasaran Strategis: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Lingkungan Perumahan Danpermukiman Perkotaan yang Merata bagi Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja 2024	Realisasi Kinerja 2024	Target Akhir RPD 2026
Persentase rumah yang didukung oleh PSU	10,37	12,9	11
Pemukiman yang tertata	6,34	6,62	6,49

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional indikator ini



e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab keberhasilan pada sasaran Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup dengan meningkatnya kualitas sarana prasarana utilitas umum di perumahan serta meningkatnya kualitas lingkungan sehat bebas dari kemukiman dimana luas permukiman yang tertata 174,6045 sedangkan luas pemukiman 2636,45

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.53					
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya					
Sasaran Strategis: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Lingkungan Perumahan Danpermukiman Perkotaan yang Merata bagi Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup					
Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Anggaran	Realisasi	Capaian	
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan danpermukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	31.645.828	2.660.000	8,41	99,93%
	Pengelolaan Izin Membuka Tanah	192.113.600	118.675.440	61,77	99,46%
	Penatagunaan Tanah	2.524.057.000	2.490.970.000	98,69	99,14%
	Pengembangan Perumahan	1.015.966.200	937.586.060	92,29	99,19%
	Kawasan Permukiman	13.174.169.683	12.028.892.750	91,31	99,20%
	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	14.494.749.528	12.535.807.628	86,49	99,24%

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian sasaran strategis Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup sebesar 99,22%.

g. Analisis program yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya persentase rumah yang didukung oleh PSU, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman antara lain:

- 1) Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota, Sosialisasi dan



persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota, Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus serta Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.

- 2) Program Kawasan Permukiman yang diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
- 3) Program Penatagunaan Tanah dengan sasaran kegiatan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah.
- 4) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah dengan sasaran kegiatan penerbitan izin membuka tanah yang dilakukan dengan koordinasi dan sinkronisasi pemberian ijin membuka tanah dan pengendalian pemanfaatan tanah negara.
- 5) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan sasaran kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan.
- 6) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) yang diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan prasarana sarana utilitas perumahan, penyediaan prasarana sarana utilitas perumahan untuk menunjang fungsi hunian umum perumahan.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian integral dari seluruh proses dan mekanisme pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang didasarkan atas prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktifitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah.

Sebagai rencana pengelolaan keuangan tahunan daerah, APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024, disusun dengan pendekatan kinerja dan mengutamakan pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.

Usulan program kegiatan dan anggaran dinilai tingkat kewajarannya melalui rasionalisasi dan sinkronisasi program. Penilaian



kewajaran dan kesesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah dengan program dan kegiatan yang diusulkan, dapat dilihat dari pelaksanaan program yang sudah diselesaikan oleh perangkat daerah dengan prioritas program dan kegiatan yang diusulkan dalam capaian kinerja yang direncanakan.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Target Pendapatan Daerah tahun 2024 sebesar Rp1.021.905.073.561.00,- dan terealisasi sebesar Rp1.038.143.488.453.00,- atau 101,59%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk ditingkatkan, walaupun kontribusi PAD terhadap APBD saat ini masih relatif rendah. Untuk menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan identifikasi potensi komponen PAD yang digunakan untuk mengetahui posisi komponen PAD sebagai sumber pendapatan daerah dengan menganalisis rasio pertumbuhan jenis penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan. Salah satu tolak ukur dari perkembangan ekonomi daerah adalah besarnya pendapatan daerah pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya PAD secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat yang dapat dijadikan obyek pungut. Oleh karena itu, pencapaian target PAD merupakan faktor penting dalam menilai laju pembangunan di daerah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan tahun 2024 mencapai Rp284.536.299.558,- atau 113,43% dari target yang ditetapkan sebesar Rp250.852.619.000,-. Jika dibandingkan realisasi tahun 2022 yang mencapai Rp240.959.878.632,- maka realisasi tahun 2023 naik sebesar Rp43.576.420.926,- atau 18,08%.

Adapun target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.54
Perkembangan PAD Kota Salatiga Tahun 2013 - 2024

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Pendapatan Daerah (Realisasi)	Proporsi %
2013	87.723.650.000	106.100.450.499	603.204.201.915	17,59%
2014	114.781.747.000	165.747.645.080	727.619.868.812	22,78%
2015	143.835.170.000	167.010.555.173	673.865.039.498	24,78%
2016	172.775.326.000	203.768.652.017	879.784.189.262	23,16%
2017	188.391.649.000	218.453.587.980	880.956.308.959	24,80%
2018	209.772.712.000	208.926.057.032	889.992.411.250	23,48%
2019	221.089.796.000	236.086.218.372	928.019.899.150	25,44%
2020	197.768.282.000	219.553.318.240	890.223.683.933	24,66%
2021	237.406.216.000	280.701.251.597	946.191.087.524	29,67%
2022	218.644.038.938	240.959.878.632	918.353.779.916	26,24%
2023	250.852.619.000	284.536.299.558	987.241.298.498	28,82%
2024	290.801.610.561	313.963.680.987	1.038.143.487.948	

Sumber : BPKPD (diolah)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing



mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat.

Belanja Daerah tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.041.750.433.639,- dan terealisasi sebesar Rp1.041.750.433.639,- atau sebesar 93,01%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.014.782.383.243,- maka mengalami kenaikan sebesar Rp27.003.050.396,- atau sebesar 2,66%.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp98.153.002.474,- dan realisasinya sebesar Rp98.153.002.474,- atau mencapai 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp125.659.087.219,-, maka mengalami penurunan sebesar Rp27.506.084.745,- atau sebesar 21,89%.

Pengeluaran pembiayaan tahun 2024 tidak dianggarkan atau Rp 0,00. Jika dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.500.000.000,-, maka tahun 2024 terdapat penurunan sebesar 100%.

Pembiayaan Netto tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp Rp98.153.002.474,- dan realisasinya sebesar Rp98.153.002.474,- atau 100%. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp125.659.087.219,- maka realisasi pembiayaan netto tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp27.506.084.745,- atau 21,89%.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp98.153.002.474,- Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp127.159.087.219,- maka realisasi SILPA Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp29.060.084.745,- atau 22,81%.



BAB IV
PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Salatiga Tahun 2024, berikut hasil capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024:

Tabel 4.1
Data Capaian Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Kategori
1	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas	Rata Rata Lama Sekolah	10,68 Tahun	11,48 Tahun	107,49	Sangat Baik
		Harapan Lama Sekolah	15,44 Tahun	15,46 Tahun	100,13	Sangat Baik
		Indek Literasi Masyarakat	Nilai 52,56	Nilai 63,14	120,13	Sangat Baik
2	Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	30%	44,98%	149,93	Sangat Baik
3	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	30 Medali	32 Medali	106,66	Sangat Baik
		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	20,59%	22,95%	111,46	Sangat Baik
4	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Angka Harapan Hidup	77,78 Tahun	77,93 Tahun	100,19	Sangat Baik
		Laju Pertumbuhan Penduduk	1,32%	1,18%	89,39	Baik
5	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Pertumbuhan Ekonomi	4,84%	4,48%	92,56	Baik
		Pendapatan per kapita	55,80 Juta	54,89 Juta data 2023	101,44%	Sangat Baik
6	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan Kerjasama antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Pertumbuhan nilai investasi	10,22%	6,89%	67,41	Cukup
		Tingkat pengangguran terbuka	6,52%	3,86%	129,95	Sangat Baik
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,84%	70,72%	101,26	Sangat Baik



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Kategori
7	Meningkatkan katahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	95,00%	97,01%	102,11	Sangat Baik
		Pola Pangan Harapan	94.40%	94,40%	100	Baik
		Persentase Peminat Transmigrasi	3,70%	20%	540,54	Sangat Baik
8	Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	Score capaian KLA	Nilai 620	611	98,55	Baik
		IDG	Nilai 80,05	Nilai 79,48	98,73	Baik
		IPG	Nilai 95,50	Nilai 95,45	99,95	Baik
9	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai 67,00	Nilai 80,21	119,71	Sangat Baik
10	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	100%	100%	100	Baik
		Penanggulangan Potensi Konflik	100%	100%	100	Baik
		Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap bencana	Nilai 3,86	Nilai 3,9	101,036	Sangat Baik
11	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik	55,00%	61,80%	112,36	Sangat Baik
12	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai 56,40	Nilai 61,45	108,95	Sangat Baik
		Rasio konektivitas kota	0,71%	0,88%	123,94	Sangat Baik
		Kinerja Lalu Lintas Kota	0,40%	0,31%	77,5	Sangat Baik
13	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan pemukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup	Persentase rumah yang didukung oleh PSU	10,37%	12,9%	124,40	Sangat Baik
		Pemukiman yang tertata	10,68 Tahun	11,48 Tahun	104,42	Sangat Baik

Sumber : Data yang diolah

Hasil pengukuran kinerja terhadap 13 sasaran dengan 29 indikator kinerja utama berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Salatiga tahun 2023 disimpulkan bahwa **20** (dua puluh) Indikator Kinerja Utama atau **68,96%** dikategorikan **Sangat Baik, 8**



(delapan) Indikator Kinerja Utama atau **27,58%** dikategorikan **Baik** dan 1(satu) Indikator Kinerja Utama atau **3,44%** dikategorikan **Cukup**.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pencapaian 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama, telah dianggarkan melalui APBD Kota Salatiga sebesar Rp1.120.058.076.035,00,- dengan realisasi sebesar Rp1.041.750.433.639,00,- atau sebesar 93,01%.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak - pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Kota Salatiga tahun 2024. Semoga LKjIP Kota Salatiga Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

